

Protected by PDF Anti-Copy Free
**PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGHADAPI
PUNGUTAN LIAR DI PASAR PERMIRI KELURAHAN
PASAR PERMIRI KOTA LUBUKLINGGAU**



TESIS

Oleh:
ANI KURNIAWATY
NPM: 2201030032
Peminatan: Sumber Daya Manusia (SDM)



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU
2025**

Protected by PDF Anti-Copy Free
PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGHADAPI
PUNGUTAN LIAR DI PASAR PERMIRI KELURAHAN
PASAR PERMIRI KOTA LUBUKLINGGAU



Oleh:
ANI KURNIAWATY
NPM: 2201030032
Peminatan: Sumber Daya Manusia (SDM)

Program Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Humaniora
Universitas Bina Insan Lubuklinggau

Menyetujui
Komisi Pembimbing
Tanggal, 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si

M Yusuf, SE., M.Si., PhD

Kaprodi Magister Manajemen
UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU

Dr. Herman Paleni, M.Si

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Puji dan Syukur Kami ucapkan kehadiran Allah SWT. karena berkat Rahmat-NYA dan hidayah-NYA Proposal Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Adapun judul Penelitian adalah **PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGHADAPI PUNGUTAN DI PASAR PERMIRI KELURAHAN PASAR PERMIRI KOTA LUBUKLINGGAU.**

Dalam kesempatan ini Peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan. Berkenaan dengan hal tersebut Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau, Bapak Dr. Sardiyono, MM.
2. Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora, Bapak Dr. Dheo Rimbano, M.Si Sekaligus Sebagai Pembimbing I
3. Kaprodi Magister Manajemen, Bapak Dr. Herman Paleni, M.Si
4. Pembimbing II Bapak M Yusuf, SE., M.Si., PhD
5. Pj Walikota Kota Lubuklinggau, Sekda Kota Lubuklinggau, dan Segenap Unsur Pimpinan di Kelurahan Pasar Pemiri Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Dosen dan Staf di Universitas Bina Insan Lubuklinggau.

Peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik apabila ada kesalahan yang sifatnya membangun. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Lubuklinggau, 2025
Peneliti

Ani Kurniawaty
NPM. 2201030032

Halaman Sampul Tesis.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian T.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan	v
Halaman Abstrak (Bahasa Indonesia).....	vi
Halaman Abstrak (Bahasa Inggris)	vii
Halaman Kata Pengantar.....	viii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus.....	9
B. Hasil Penelitian yang Relevan	37
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Rancangan Penelitian	41
B. Latar Penelitian	42
C. Metode dan Prosedur Penelitian.....	42
D. Data dan Sumber Data	43
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	44
F. Prosedur Analisis Data	45
G. Pemeriksaan Keabsahan data	47
H. Tempat dan Waktu Penelitian	49
BAB IV. HASIL PENELITIAN	51
A. Gambaran Umum Penelitian	51
B. Hasil Penelitian Rekapitan Wawancara	56

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB V. PEMBAHASAN.....	
A. Peran Kepemimpinan Lurah di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau yang Berakhlak, Kreatif, Solutif, dan Inspiratif.....	59
B. Peran Kepemimpinan Lurah di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau berdasarkan prinsip-prinsip <i>governance</i>	68
C. Hambatan dan Solusi Lurah Permiri dalam menghadapi indikasi terjadinya kegiatan pungutan liar.....	74
D. Strategi Optimalisasi fungsi pengawasan di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau agar mengurangi kegiatan pungutan liar.....	76
 BAB VI. SIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Simpulan	80
B. Rekomendasi.....	82
 DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

A. Latar Belakang Masalah



Peran pemimpin menjadi sebagai aspek penting yang membantu organisasi atau kelompok mencapai tujuannya. Pemimpin memiliki peran yang lebih dari sekadar mengatur, yaitu memberikan arah, membangun motivasi, dan mengembangkan potensi tim atau individu. Robbins (2015) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok dalam pencapaian suatu visi dan tujuan.

Pemimpin yang berakhlak dapat dilihat dari kemampuannya dalam memotivasi anggota tim atau pengikutnya. Mereka menciptakan lingkungan yang mendukung sehingga anggota tim merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Teori motivasi seperti *Maslow's Hierarchy of Needs* dan *Herzberg's Two-Factor Theory* sering digunakan untuk memahami bagaimana pemimpin bisa memotivasi tim dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu (Ozguner, Z., & Ozguner, M. 2014).

Pemimpin yang kreatif harus mampu menjadi agen perubahan yang mendorong inovasi, fleksibilitas, dan adaptasi terhadap perubahan. Teori *Transformational Leadership* oleh Bernard Bass menunjukkan bahwa pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk membawa perubahan yang signifikan dalam organisasi, mendorong anggota tim untuk keluar dari zona nyaman, dan menjadi lebih kreatif (Bass, B. M. 2006).

Pemimpin yang solutif tercermin dalam sosok pemimpin bertanggung jawab untuk menangani konflik yang mungkin terjadi di dalam tim. Menurut *Conflict Resolution Theory*, pemimpin yang efektif harus memiliki kemampuan untuk mengenali sumber konflik, mediasi, dan mencari solusi yang adil agar hubungan dalam tim tetap harmonis.

Pemimpin yang inspiratif diperlihatkan dari pemimpin yang terus mengembangkan dirinya dan berusaha meningkatkan keterampilan serta pengetahuan timnya. *Situational Leadership Theory* yang dikembangkan oleh Paul Hersey dan Ken Blanchard menekankan bahwa pemimpin harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan dan perkembangan tim agar dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi (Hersey, P., & Blanchard, K. H. 1997).

Secara administratif, pada Tahun 2024 Kelurahan Pasar Permiri memiliki struktur organisasi, yang terdiri dari 1 (satu) Orang Lurah, 1 (satu) Orang Sekretaris Lurah, 3 (Tiga) Orang Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan & Trantib, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi pelum dan Kesos), 1 (satu) Orang staf TKS dan 6 (Enam) Orang Ketua Rukun Tetangga. Jumlah Pemerintahan terendah di Kelurahan Pasar Permiri berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 6(Enam) Rukun Tetangga (RT)

Jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Permiri pada Tahun 2020 adalah 2011 jiwa terdiri 1022 jiwa perempuan dan 989 jiwa laki-laki dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 630 KK dengan Penduduknya Mayoritas bermata Pencaharian Pedagang . Diwilayah Kelurahan Pasar Permiri secara sektor Keagamaan dan sejarah/budaya berdiri kokoh Masjid Agung As-Salam yg juga menjadi Icon Kota Lubuklinggau mengingat Letak Strategisnya yg berada di

Tengah Kota Lubuklinggau di Wilayah Kelurahan Pasar Pemiri, berdampingan dengannya Terdapat Museum Subkoss Garuda Lubuklinggau.

Dalam konteks pasar tradisional seperti Pasar Pemiri di Kota Lubuklinggau, peran dan fungsi kepemimpinan yang baik sangat berperan untuk menciptakan lingkungan pasar yang tertib, efisien, serta memberikan pelayanan yang adil kepada para pedagang dan masyarakat. Implementasi kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* (Tata Kelola yang Baik) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Untuk mewujudkan *Good Governance* di Pasar Pemiri, pemimpin harus menanamkan prinsip-prinsip ini dalam setiap aspek pengelolaan pasar. Ini mencakup penyusunan kebijakan yang adil, penerapan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan kebijakan, serta menjaga keterbukaan dalam segala tindakan. Dengan menerapkan kepemimpinan yang berlandaskan *Good Governance*, pemimpin dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pedagang, menciptakan pasar yang lebih kompetitif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Lubuklinggau.

Optimalisasi fungsi pengawasan dalam peran kepemimpinan Lurah di Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau sangat penting untuk memerangi praktik pungutan liar (pungli). Dengan pengawasan yang efektif, Lurah dapat mencegah pungli dan menciptakan lingkungan pasar yang transparan, adil, serta aman bagi pedagang dan pengunjung.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam peran kepemimpinan Lurah di Pasar Pemiri membutuhkan kombinasi antara sistem yang kuat, kolaborasi yang baik, dan transparan yang transparan serta partisipatif. Dengan menerapkan strategi ini, diharapkan Pasar Pemiri dapat bebas dari pungutan liar, sehingga tercipta lingkungan pasar yang adil, tertib, dan ramah bagi semua pihak.

Pungutan liar atau Pungli di tingkat kelurahan biasanya terkait dengan pelayanan administrasi dan pengurusan surat-surat yang diperlukan masyarakat, yang sebenarnya seharusnya dapat diperoleh tanpa biaya tambahan di luar biaya resmi. Seperti dalam kasus indikasi adanya pungli dalam Pengurusan Surat Keterangan, Dimana indikasi terdapat Seorang warga memerlukan surat keterangan domisili atau surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kantor kelurahan untuk keperluan administrasi, seperti pendaftaran sekolah atau bantuan sosial. Meskipun seharusnya layanan ini gratis atau memiliki tarif resmi, petugas meminta "uang pelicin" agar surat bisa diproses lebih cepat atau agar prosesnya tidak dipersulit.

Indikasi dalam kasus Pungli dalam Pengurusan KTP dan KK, Dimana indikasi terdapat Seorang warga yang ingin membuat atau memperbarui KTP dan Kartu Keluarga (KK) sering kali dihadapkan pada petugas yang meminta biaya tambahan. Alasan yang sering diberikan adalah untuk mempercepat proses, walaupun sebenarnya proses tersebut tidak memerlukan biaya tambahan.

Indikasi dalam kasus Pungli dalam Pengurusan Izin Usaha Kecil atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Dimana indikasi terdapat Ketika warga mengurus izin usaha kecil SITU di kelurahan, oknum petugas kadang meminta sejumlah uang tambahan agar izin segera disetujui. Dalam beberapa kasus, jika warga tidak membayar, proses perizinan dapat diperlambat atau dipersulit.

Indikasi dalam kasus Pungli dalam Program Bantuan Sosial, Dimana ada indikasi Ketika ada bantuan sosial dari pemerintah, seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sembako, atau program bedah rumah, oknum di kelurahan kadang meminta "potongan" dari dana bantuan tersebut dengan alasan biaya administrasi atau distribusi.

Indikasi dalam kasus Pungli dalam Pengurusan Sertifikat Tanah atau Surat Pertanahan, Dimana ada indikasi Warga yang ingin mengurus surat keterangan tanah atau persetujuan batas tanah sering kali dihadapkan dengan pungli di tingkat kelurahan. Petugas mungkin meminta biaya tambahan dengan alasan administrasi atau percepatan proses.

Indikasi dalam kasus Pungli dalam Penerimaan Pegawai Kontrak atau Staf Honor di Kelurahan, Dimana ada indikasi Beberapa oknum di kelurahan mungkin meminta sejumlah uang kepada pelamar yang ingin menjadi staf honor atau pegawai kontrak. Uang ini disebut sebagai "uang masuk" agar pelamar dapat diterima bekerja di kelurahan.

Indikasi dalam kasus Pungli dalam Program Bantuan Pendidikan, indikasinya dalam beberapa kasus, ketika anak-anak dari keluarga kurang mampu memerlukan surat rekomendasi atau surat pengantar untuk memperoleh

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

beasiswa atau bantuan pendidikan, ada petugas yang meminta pungli agar surat tersebut bisa dikeluarkan.

Untuk mencegah hal ini terulang, maka perlu peran dominan dari lurah, lurah harus menunjuk orang-orang yang memiliki peran pemimpin yang berakhlak, inovatif, solutif, dan inspiratif dengan menggunakan prinsip-prinsip good governance, Tindakan-tindakan pencegahan harus segera di implementasikan sebab masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai hak-hak mereka dan prosedur resmi yang berlaku, Pemerintah dan aparat harus memperketat pengawasan terhadap praktik pungli dan menindak tegas oknum yang terlibat. Membentuk jalur pengaduan yang aman dan mudah diakses, sehingga mereka bisa melaporkan pungli tanpa takut akan intimidasi atau dampak negatif. Dan Sanksi yang tegas bagi pelaku pungli.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENGHADAPI PUNGUTAN LIAR DI PASAR PERMIRI KELURAHAN PASAR PERMIRI KOTA LUBUKLINGGAU.**

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1) Fokus Penelitian:

Peran Kepemimpinan dalam Menghadapi Pungutan Liar di Pasar Permiri Kelurahan Pasar Permiri Kota Lubuklinggau. Dengan ruang lingkup penelitian:

1. Ruang lingkup Pasar Permiri di bawah lingkungan Kantor Lurah; dan
2. Ruang lingkup Pasar Permiri yang bersentuhan dengan pihak Dinas Pasar Kota Lubuklinggau

2) Sub Fokus Penelitian: **Protected by PDF Anti-Copy Free**

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, maka Peneliti harus membuat sub fokus penelitian. Sub fokus dalam penelitian ini terdiri dari empat sub fokus yang diartikan sebagai berikut. Penelitian ini didasarkan oleh Anwar Sadat (2017), Aloj Kamarasyid (2019), dan Abdul Rasyid Saliman (2022).

Adapun ketiga sub fokus tersebut sebagai berikut:

1. Peran kepemimpinan yang berakhlak, kreatif, solutif, dan inspiratif
2. Peran kepemimpinan yang baik di Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*
3. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan dalam peran kepemimpinan Lurah di Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau menghadapi tindakan pungutan liar.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah peran kepemimpinan Lurah di pasar pemiri Kota Lubuklinggau telah berjalan secara BKSI (Berakhlak, Kreatif, Solutif, dan Inspiratif)?
2. Apakah peran kepemimpinan Lurah di Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau berjalan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*?
3. Apa saja hambatan dan solusi Lurah Pasar Pemiri dalam menghadapi indikasi terjadinya kegiatan pungutan liar?
4. Bagaimana strategi optimalisasi fungsi pengawasan di Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau agar mengurangi kegiatan pungutan liar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Peran Kepemimpinan di Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau telah berjalan sebagaimana mestinya.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah di Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau terdapat kegiatan pungutan liar dan seperti apa kegiatannya.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja Tantangan dan peluang pemimpin dalam menghadapi keadaan terjadinya pungutan liar di Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi perbaikan optimalisasi kedepan dalam kegiatan pengawasan di Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau agar mengurangi kegiatan pungutan liar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teori dapat memberikan gambaran mengenai analisis peran Kepemimpinan dalam Menghadapi Pungutan Liar di Pasar Pemiri Kelurahan Pasar Pemiri Kota Lubuklinggau.
- 2) Temuan dilapangan menjadi masukan untuk perbaikan konsep dalam ilmu kepemimpinan.

b. **Protected by PDF Anti-Copy Free**

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

1) Secara praktik dapat memberikan gambaran mengenai analisis

Peran Kepemimpinan dalam Menghadapi Pungutan Liar di Pasar

Permiri Kelurahan Permiri Kota Lubuklinggau.

2) Temuan dilapangan menjadi masukan untuk perbaikan konsep

dalam ilmu kepemimpinan di Kelurahan Pasar Permiri.



A. Deskripsi Konseptual Fokus

1. Teori Kepemimpinan

Pada awalnya kepemimpinan diartikan sebagai memotivasi atau mendorong anggota untuk melakukan sesuatu, sebagaimana dikemukakan oleh Bennis (1959) “Kepemimpinan adalah suatu proses di mana pemimpin mendorong bawahan agar berperilaku sesuai dengan yang diinginkan”. Pengertian berikutnya, kepemimpinan adalah pengarahan dan pengkoordinasian seperti dikemukakan oleh Fiedler (1981) bahwa “Kepemimpinan adalah pengarahan dan pengkoordinasian anggota-anggota kelompok dalam mencapai tujuan”.

Berikut beberapa definisi kepemimpinan yang disusun oleh Penulis, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Definisi Kepemimpinan Menurut para Ahli

Ahli	Definisi
Ordway Tead (1935)	Leadership is the activity of influencing people to cooperate toward some goal which come to find desirable Kepemimpinan adalah aktivitas memengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan
G.L. Freeman & E.K. Taylor (1950)	Leadership is ability to create group action toward an organizational ob.y'ecfiveness and cooperation from each individual. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menciptakan kegiatan kelompok dalam kerja sama untuk mencapai tujuan organisasi
John D. Pfiffner	Leadership is the aft of coordinatng and motivating

AHL	Definisi
& Robert Presthus (1967)	individuals and groups to achieve desired ends. Kepemimpinan adalah seni mengoordinasi dan memotivasi individu-individu serta kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan
Harold Koontz & Cyrill O'Donnell (1976)	Leaders are the art of inducing subordinates to accomplish their assignment with zeal and confidence Kepemimpinan adalah seni membujuk bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka dengan penuh semangat
Richards & Eigel, (1986)	Kepemimpinan adalah cara mengartikulasikan visi, mewujudkan nilai, dan menciptakan lingkungan guna mencapai sesuatu.
E. H. Schein (1992)	Kepemimpinan adalah kemampuan untuk bertindak di luar budaya untuk memulai proses perubahan evolusi agar menjadi lebih adaptif.

Perkembangan pengertian kepemimpinan selanjutnya adalah adanya hubungan pengaruh khusus sebagaimana dikemukakan oleh Hollander & Julian (1969) sebagai berikut “Kepemimpinan adalah hadirnya hubungan pengaruh khusus antara sang pemimpin dengan anggota-anggota kelompok dalam mencapai tujuan organisasi”. Perkembangan pengertian kepemimpinan menjelang akhir abad ke-20 lebih mengarah pada pengalokasian seluruh sumber daya organisasi secara efisien dan efektif seperti dikemukakan oleh Campbell (1991) sebagai berikut Kepemimpinan adalah tindakan yang mengarahkan/ mengalokasikan sumber daya untuk menciptakan kesempatan yang dikehendaki oleh organisasi (Hutahaean, 2021).

Adapun pengertian kepemimpinan pada awal abad ke-21 diartikan sebagai proses pemengaruhan sang pemimpin kepada para anggota-anggota organisasi, seperti dikemukakan oleh Greenberg & Baron (2003) “Kepemimpinan adalah proses di mana seorang pemimpin memengaruhi

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

anggota anggota kelompok lainnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama”. Dari berbagai pengertian kepemimpinan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu faktor atau komponen yang sangat penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Lalu, apakah kepemimpinan efektif itu? Peter Drucker, menjawabnya dengan beberapa kata: “fondasi dari kepemimpinan yang efektif adalah berpikir berdasar misi organisasi, mendefinisikannya dan menegakkannya, secara jelas dan nyata” (Hutahaean, 2021).

Pemimpin yang efektif terlihat dari tanda-tanda empiris seperti organisasi yang produktif. Produktivitas organisasi tersebut tentunya mengarah pada pencapaian visi dan misi organisasi. Pemimpin yang efektif menjadikan organisasi berjalan dengan lebih baik. Berdasarkan riset untuk menilai, mengembangkan pemimpin, dan bagaimana arsitektur kepemimpinan yang baik.

Seorang pemimpin yang efektif ternyata memiliki lima ciri yang harus ada, yaitu: 1. Strategy, seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang ahli menyusun strategi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasinya. 2. Executor (pelaksana), seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang tahu bagaimana mengeksekusi strategi yang telah disusunnya, walaupun dia tidak terjun langsung dalam eksekusinya. 3. Talent manager (manajer talenta), seorang pemimpin efektif adalah seorang yang secara konsisten menerapkan manajemen talenta dalam organisasinya. 4. HR Developer (pengembang SDM), seorang pemimpin efektif adalah seorang yang fokus pada pengembangan SDM organisasinya. 6. Personal skills (kecakapan pribadi),

seorang pemimpin yang efektif mempunyai kecakapan pribadi yang memungkinkan dia untuk dapat dicontoh, menginspirasi, dan juga memotivasi para pengikutnya (Mu'ah dkk, 2019).

Pada dasarnya suatu kepemimpinan muncul bersamaan dengan adanya peradaban manusia, yaitu sejak zaman nabi dan nenek moyang di sini terjadi perkumpulan bersama yang kemudian bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya dari kepunahan, sehingga perlu suatu kepemimpinan. Pada saat itu seorang yang dijadikan pemimpin adalah orang yang paling kuat, paling cerdas, dan paling pemberani (Mu'ah dkk, 2019).

Jadi, kepemimpinan muncul karena adanya peradaban dan perkumpulan antara beberapa manusia. Sebab munculnya pemimpin diawali oleh berbagai pandangan dan pendapat berupa teori yang dapat dibenarkan secara ilmiah. Munculnya pemimpin dikemukakan dalam beberapa teori, yaitu teori pertama, berpendapat bahwa seseorang akan menjadi pemimpin karena ia dilahirkan untuk menjadi pemimpin; dengan kata lain ia mempunyai bakat dan pembawaan untuk menjadi pemimpin (Mu'ah dkk, 2019).

Menurut teori ini tidak setiap orang bisa menjadi pemimpin, hanya orang-orang yang mempunyai bakat dan pembawaan saja yang bisa menjadi pemimpin. Maka, muncullah istilah "leaders are borned not built". Teori ini disebut Teori Genetis. Teori kedua, mengatakan bahwa seseorang akan menjadi pemimpin kalau lingkungan, waktu atau keadaan memungkinkan ia menjadi pemimpin. Setiap orang bisa bermimpi menjadi pemimpin asal diberi kesempatan dan diberi pembinaan untuk menjadi seorang pemimpin walaupun ia tidak mempunyai bakat atau pembawaan (Mu'ah dkk, 2019).

Maka muncullah istilah *leaders are built not borned*. Teori ini disebut

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
Teori Social. Teori ketiga, merupakan gabungan dari teori yang pertama dan yang kedua untuk menjadi pemimpin perlu bakat dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. Kemungkinan untuk mengembangkan bakat ini tergantung kepada lingkungan, waktu, dan keadaan. Teori ini disebut Teori Ekologis. Teori keempat, disebut Teori Situasi. Menurut teori ini setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi tertentu saja, karena ia mempunyai kelebihan-kelebihan yang diperlukan dalam situasi itu. Dalam situasi lain di mana kelebihan-kelebihannya itu tidak diperlukan, ia tidak akan menjadi pemimpin, bahkan mungkin hanya menjadi pengikut saja (Mu'ah dkk, 2019).

Dengan demikian, seorang pemimpin yang ingin meningkatkan kemampuan dan kecakapannya dalam memimpin, perlu mengetahui ruang lingkup gaya kepemimpinan yang efektif. Para ahli di bidang kepemimpinan telah meneliti dan mengembangkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan evolusi teori kepemimpinan. Untuk ruang lingkup gaya kepemimpinan terdapat tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan sifat kepribadian pemimpin, pendekatan perilaku pemimpin, dan pendekatan situasional atau kontingensi (Mu'ah dkk, 2019). Terdapat perbedaan antara manajer dan pemimpin, seorang pemimpin yang baik harus mampu membedakannya:

Protected by PDF Anti-Copy Free
Table 2.2 Perbedaan Manajer dan pemimpin
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No.	Manajer	Pemimpin
1.	Mengelola	Memulai
2.	Tiruan	Orisinal
3.	Mempertahankan	Mengembangkan
4.	Fokus pada sistem dan struktur	Fokus pada orang
5.	Bergantung pada hasil pengawasan	Membangkitkan kepercayaan
6.	Memiliki pandangan jarak pendek	Memiliki perspektif jarak jauh
7.	Selalu berorientasi pada hasil akhir	Berorientasi pada masa depan
8.	Meniru	Memulai
9.	<i>Menerima status quo</i>	Menantanginya
10.	Melakukan dengan benar	Melakukan yang benar

(Mu'ah, 2019)

Adapun gaya-gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut: Gaya kepemimpinan otokratis. Gaya ini terkadang disebut sebagai kepemimpinan yang terpusat pada diri pemimpin atau gaya direktif. Gaya otokratis ini ditandai dengan adanya petunjuk yang sangat banyak sekali dan berasal dari pemimpin dan tidak ada satupun peran para anak buah dalam merencanakan dan sekaligus mengambil suatu keputusan. Gaya kepemimpinan otokratis ini akan menentukan sendiri keputusan, peran, bagaimana, kapan dan bilamana secara sepihak (Nilasari M 2023).

Pastinya tugas yang diperintahkan harus dilaksanakan. Paling sangat menonjol dalam gaya kepemimpinan otokratis ini adalah seseorang akan memberikan perintah dan mesti dipatuhi. Ia akan memerintah berdasarkan dari kemampuannya untuk menjatuhkan hukuman serta memberikan hadiah. Gaya kepemimpinan otokratis adalah suatu kemampuan dalam memengaruhi orang lain yang ada di sekitar agar mau bersedia bekerja sama dalam mencapai

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
tujuan yang sudah ditentukan dengan ditempuh atas segala cara kegiatan yang akan dijalankan atas dasar putusan dari pemimpin (Nilasari M 2023).

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan otokratis ini, yaitu wewenang mutlak itu terpusat dari pemimpin. Keputusan akan selalu dibuat oleh pemimpin, kebijakan akan selalu dibuat oleh pemimpin, komunikasi hanya berlangsung dalam satu arah di mana dari pimpinan ke bawahan bukan sebaliknya, pengawasan terhadap (sikap, perbuatan, tingkah laku, atau kegiatan) dari para bawahannya dilakukan dengan ketat, tak ada kesempatan untuk para bawahan dalam memberikan (pendapat, saran, atau pertimbangan), lebih banyak mendapatkan kritikan dibanding pujian, menuntut adanya kesetiaan dan prestasi yang sempurna dari para bawahan tanpa adanya syarat, dan cenderung memberikan paksaan, hukuman, dan ancaman (Nilasari M 2023).

Gaya kepemimpinan partisipatif, adalah kemampuan memengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Gaya kepemimpinan partisipatif terkadang disebut sebagai gaya kepemimpinan yang terpusat pada anak buah, kepemimpinan dengan adanya kesederajatan, kepemimpinan partisipatif atau konsultatif. Pemimpin yang berkonsultasi kepada anak buahnya dalam merumuskan suatu tindakan putusan Bersama (Nilasari M 2023).

Gaya kepemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri, yaitu pemimpin jarang memberikan arahan, pembuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Dengan demikian, maka gaya kepemimpinan delegatif seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi adanya karakter

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
pribadinya. Gaya kepemimpinan delegatif sangat cocok dilakukan kalau staf yang dimiliki ternyata mempunyai motivasi dan kemampuan yang tinggi (Nilasari M 2023).



Gaya kepemimpinan ini dilukiskan dengan pernyataan “Memimpin berdasarkan adanya peraturan”. Perilaku memimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang telah berlaku untuk pemimpin dan anak buahnya. Pemimpin yang birokratis, secara umum membuat segala keputusan berdasarkan dari aturan yang telah berlaku dan tidak ada lagi fleksibilitas (Nilasari M 2023).

Segala kegiatan mesti terpusat pada pemimpin dan sedikit saja diberikan kebebasan kepada orang lain dalam berkreasi dan bertindak, itu pun tak boleh melepaskan diri dari ketentuan yang sudah berlaku. Adapun beberapa ciri gaya kepemimpinan birokratis ialah pimpinan akan menentukan segala keputusan yang berhubungan dengan seluruh pekerjaan dan akan memerintahkan semua bawahan untuk bisa melaksanakannya; Pemimpin akan menentukan semua standar tentang bagaimana bawahan akan melakukan tugas; Adanya sanksi yang sangat jelas kalau seorang bawahan tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan standar kinerja yang sudah ditentukan (Sutikno, M. S. 2018).

Gaya kepemimpinan Laissez Faire akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin, sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahan mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin sedikit sekali dalam menggunakan kekuasaannya atau sama sekali

telah membiarkan anak buahnya untuk berbuat dalam sesuka hatinya (Sutikno, M. S. 2018).
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan Laissez Faire adalah bawahan akan diberikan kelonggaran atau kebebasan dalam menjalankan tugas-tugasnya, tetapi dengan hati-hati diberikan batasan serta berbagai macam prosedur; Bawahan yang sudah berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugasnya akan diberikan hadiah atau penghargaan, di samping adanya suatu sanksi-sanksi bagi mereka yang kurang berhasil, sebagai dorongan (Sutikno, M. S. 2018).

Hubungan antara pimpinan dan bawahan dalam suasana yang sangat baik secara umum manajer akan bertindak cukup baik; Manajer akan menyampaikan berbagai macam peraturan yang berhubungan dengan tugas-tugas atau perintah, dan sebaliknya para bawahan akan diberikan kebebasan dalam memberikan pendapatannya (Sutikno, M. S. 2018).

Gaya kepemimpinan Otoriter/Authoritarian, adalah gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab akan dipegang oleh si pemimpin yang bergaya otoriter tersebut, sedangkan para bawahan hanya sekadar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Tipe kepemimpinan yang otoriter biasanya mengarah kepada tugas. Artinya, dengan adanya tugas yang telah diberikan oleh suatu lembaga atau suatu organisasi, maka kebijaksanaan dari lembaganya ini mesti diproyeksikan dalam memerintah kepada bawahannya. Di sini bawahan menjadi mesin yang digerakkan sesuai dengan kehendak pemimpin, inisiatif yang datang dari bawahan sama sekali tidak pernah diperhatikan (Sutikno, M. S. 2018).

Protected by PDF Anti Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Gaya Kepemimpinan Kharismatis, kelebihan dari gaya kepemimpinan kharismatis ini ialah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara berbicaranya yang akan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Mungkin, kelemahan terbesar dari tipe kepemimpinan model ini dapat dianalogikan dengan peribahasa Tong Kosong yang Nyaring Bunyinya. Mereka hanya mampu menarik orang untuk bisa datang kepada mereka. Setelah beberapa lama kemudian, orang-orang yang datang tersebut akan kecewa karena adanya ketidakkonsistenan. Apa yang telah diucapkan ternyata tidak dilakukan. Ketika diminta dalam pertanggungjawabannya, si pemimpin akan senantiasa memberikan alasan, permintaan maaf, dan janji (Sutikno, M. S. 2018).

Gaya kepemimpinan Diplomatis, kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di penempatan perspektifnya. Kesabaran dan kepasifan merupakan kelemahan pemimpin dengan menggunakan gaya diplomatis ini. Umumnya, mereka sangat begitu sabar dan sanggup dalam menerima tekanan. Namun kesabarannya sangat keterlaluan. Mereka dapat menerima perlakuan yang tak menyenangkan tersebut, tetapi pengikut-pengikutnya tidak menerimanya. Dan sering kali hal inilah yang membuat para pengikutnya meninggalkan si pemimpin (Sutikno, M. S. 2018).

Gaya kepemimpinan Moralitas, kelebihan dari gaya kepemimpinan moralitas ialah umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari bawahannya, juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebajikan-kebajikan ada

dalam diri pemimpin tersebut. Orang-orang akan datang karena kehangatannya terlepas dari semua kekurangannya. Kelemahan dari kepemimpinan seperti ini ialah Rata-rata orang seperti ini sangatlah tidak stabil, terkadang dapat tampil dan sangat mengerikan, kadang pula bisa saja sangat begitu menyenangkan dan bersahabat (Jaspinm 2021).

Gaya kepemimpinan Administratif, gaya kepemimpinan tipe ini terkesan kurang inovatif dan terlalu kaku dalam memandang aturan. Sikapnya sangat konservatif serta kelihatan sekali takut di dalam mengambil risiko dan mereka cenderung mencari aman (Jaspinm 2021).

Gaya kepemimpinan Analitis (Analytical). Dalam gaya kepemimpinan tipe ini, biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada suatu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Gaya ini berorientasi pada hasil dan akan lebih menekankan pada rencana-rencana rinci serta berdimensi jangka panjang. Kepemimpinan model ini sangatlah mengutamakan logika dengan menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan yang masuk akal serta kuantitatif (Jaspinm 2021).

Gaya kepemimpinan Asertif (Assertive), gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat besar pada suatu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Pemimpin tipe asertif lebih terbuka di dalam konflik dan kritik. Setiap pengambilan keputusan muncul dari suatu proses argumentasi dengan adanya beberapa sudut pandang sehingga muncullah kesimpulan yang memuaskan. (Jaspinm 2021).

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Gaya Kepemimpinan Entrepreneur. Gaya kepemimpinan ini sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan kerja sama. Gaya kepemimpinan model ini biasanya selalu mencari peluang akan menargetkan standar yang tinggi (Jaspinm 2021).

Gaya kepemimpinan Visioner, kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Kepemimpinan visioner memerlukan kompetensi tertentu. Pemimpin visioner setidaknya mesti mempunyai empat kompetensi kunci sebagaimana dikemukakan oleh Burt Nanus (1992), yaitu 1) Seorang pemimpin visioner mesti mempunyai kemampuan untuk bisa berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk menghasilkan “guidance, encouragement, and motivation”; 2) Seorang pemimpin visioner mesti dapat memahami lingkungan luar dan dapat memiliki kemampuan dalam bereaksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang yang datang; 3) Seorang pemimpin mesti bisa memegang peran penting di dalam membentuk dan dapat memengaruhi segala praktik organisasi, prosedur, produk dan jasa dengan mempersiapkan dan memandu jalan organisasi ke masa depan (successfully achieved vision); 4) Seorang pemimpin visioner mesti mampu dalam mengelola perubahan, termasuk di dalamnya dapat mengubah budaya organisasi yang tak lagi kondusif dan

Produktif. Pemimpin mesti memiliki visi yang tajam, pandai mengelola keragaman dapat memberikan motivasi karena adanya dinamika suatu perubahan lingkungan serta persaingan yang semakin ketat (Jaspinn 2021).



Gaya kepemimpinan Situasional. Kepemimpinan situasional ialah “a leadership contingency theory that focuses on followers readiness/ maturity”. Inti dari teori kepemimpinan situasional ialah bahwa suatu gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan dapat berbeda-beda, tergantung dari seperti apa tingkat kesiapan para pengikutnya. Pemahaman fundamen dari teori kepemimpinan situasional ialah mengenai tidak adanya gaya kepemimpinan yang paling terbaik. Kepemimpinan yang efektif ialah bergantung dari relevansi tugas, dan hampir semua pemimpin yang sukses selalu dapat mengadaptasi gaya kepemimpinan yang sangat tepat (Sugito, 2024).

Efektivitas kepemimpinan bukan hanya pada soal pengaruh terhadap individu dan kelompok akan tetapi bergantung juga terhadap tugas, pekerjaan atau fungsi yang dibutuhkan secara keseluruhan. Jadi, pendekatan pada kepemimpinan situasional itu mesti fokus pada fenomena kepemimpinan di dalam suatu situasi yang unik. Teori kepemimpinan situasional akan bertumpu pada dua konsep yang fundamental, yaitu tingkat kesiapan/kematangan individu atau kelompok sebagai pengikut dan gaya kepemimpinan (Sugito, 2024).

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Gaya Kepemimpinan Militeristik. Tipe pemimpin seperti ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap para anggota kelompoknya. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik, yaitu:

- (1) lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat begitu otoriter, kaku dan sering kali kurang bijaksana,
- (2) menghendaki adanya kepatuhan yang mutlak dari bawahan,
- (3) sangat menyenangi suatu formalitas, upacara-upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang terlalu berlebihan,
- (4) menuntut adanya sebuah disiplin yang keras dan kaku dari para bawahannya,
- (5) tidak menghendaki adanya saran, usul, sugesti, dan kritikan-kritikan dari bawahannya,
- (6) komunikasi hanya dapat berlangsung searah

(Sugito, 2024).

2. Strategi dan pengendalian dalam kepemimpinan

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang berarti jenderal atau perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Dalam arti yang sempit strategi menurut Matloff dalam J. Salusu (2002) strategi berarti *the art of the general* (seni jenderal dalam memimpin), artinya seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam pembinaan, pengadaan, pengambilan langkah keputusan, memanfaatkan peluang yang ada serta memotivasi anggotanya untuk mencapai suatu tujuan (Sugito, 2024).

Hal ini lebih memberi penekanan pada kepemimpinan yang strategik dan suatu budaya yang kuat untuk mengambil keputusan yang harus dibuat secara cepat, walau risiko besar. Perubahan diperlukan agar dapat bertahan dan

bersaing secara efektif dalam lingkungan baru. Perubahan yang semakin kompleks ini menuntut adanya kepemimpinan yang strategis, karenanya, kepemimpinan organisasi meliputi: 1) mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terus-menerus. 2) menyediakan keahlian untuk menghadapi dampak perubahan yang terus-menerus terhadap manajemen (Sugito, 2024).

Kepemimpinan strategis mengarahkan dan menuntut suatu visi sepanjang waktu serta mengembangkan kepemimpinan masa depan dan budaya organisasional. Tantangan pemimpin strategis adalah mendorong komitmen di antara orang-orang dalam suatu organisasi serta para pemangku kepentingan (stakeholders) di luar organisasi untuk menerima perubahan dan melaksanakan strategi yang ditujukan untuk memposisikan organisasi agar tetap sukses di masa depan (Sugito, 2024).

Strategi secara umum adalah teknik untuk mendapatkan kemenangan (victory) dalam pencapaian tujuan (to achieve goals). Berikut beberapa pengertian strategi menurut para ahli: a. Menurut Carl Von Clausewitz (Carl Philipp Gottfried, 1780-1831) seorang ahli strategi dan peperangan, pengertian strategi adalah penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan “the use of engagements for the object of war”. Kemudian dia menambahkan bahwa politik atau policy merupakan hal yang terjadi setelah terjadinya perang (war is a mere continuation of politics by other means/ Der Krieg is teine blobe Fortsetzung der Politik mitanderen Mitteln). b. Menurut business dictionary, pengertian strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk membawa masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi

untuk masalah, pengertian strategi adalah seni dan ilmu perencanaan dan memanfaatkan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif.

Istilah strategi berasal dari Yunani untuk ahli militer atau memimpin pasukan. c. Menurut Herberg (1998), seorang ahli bisnis dan manajemen, bahwa pengertian strategi terbagi atas lima definisi, yaitu strategi sebagai: a) rencana (plan), b) strategi sebagai pola (pattern), c) strategi sebagai posisi (positions), d) strategi sebagai taktik/cara (ploy), dan e) strategi sebagai perspektif (perspective) (Jaspin, 2021).

Dari perspektif kepemimpinan, pemikiran strategik adalah kompetensi kepemimpinan yang lebih dilandasi oleh filosofi organisasi. Dari sudut perspektif kepemimpinan strategik, perubahan dunia bisnis tidak selalu berjalan secara linear, sehingga organisasi beserta para pelaku yang terlibat di dalamnya harus bertindak dengan lebih gesit, fleksibel, cerdas dan bijaksana, karena para pemimpin perlu menyesuaikan rencana mereka dengan permasalahan yang muncul, bahkan ketika menghadapi situasi yang ambigu. Dalam perspektif holistik, melibatkan pemahaman tentang motivasi manusia, nilai-nilai organisasi formal dan informal, budaya organisasi, serta hubungan intra dan antar organisasi (Jaspin, 2021).

Dengan memahami interaksi sosial dalam perspektif organisasional, maka dapat diperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam konteks berpikir strategik tersebut. Beberapa asumsi menjelaskan bahwa tugas perencanaan atau berpikir strategik merupakan fungsi, wewenang dan tanggung jawab kepemimpinan. Terutama

kaitannya dengan tugas pemimpin untuk melakukan pengendalian, membimbing, dan membentuk lingkungan organisasional (Jaspin, 2021).

Untuk memahami hakikat kepemimpinan stratejik, Summer dalam Salusu, (1980) mengisyaratkan agar kelompok stratejik dalam hal ini para ahli strategi, menghayati empat falsafah umum sebagai berikut. a. Pertama, pertanggungjawaban etis para ahli strategi di dalam masyarakat, yaitu bagaimana mereka mengintegrasikan organisasi dengan berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Peranan ahli strategi di sini sebagai integrator role. b. Kedua, the competence role, yaitu pertanggungjawaban ahli strategi di dalam tubuh organisasi. Mereka tidak hanya melihat ke luar, tetapi perlu juga memberi perhatian terhadap organisasinya sendiri, terutama dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi internalnya. Integrator role memperlihatkan bahwa organisasi itu adalah instrumen untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Competence role mengisyaratkan bahwa kepemimpinan stratejik adalah instrumen utama untuk membangun organisasi. c. Ketiga, pertanggungjawaban sosial yaitu the pluralistic role. Di sini kelompok stratejik didorong untuk menghilangkan pernyataan dan tuduhan bahwa produk dan pelayanan organisasinya kurang baik atau kurang cocok dengan masyarakat, bahwa operasi internal tidak cocok atau tidak baik bagi karyawannya. d. Keempat, the judgement role, etika stratejik, yaitu suatu sikap bijaksana yang perlu ditempuh oleh para ahli strategi dalam organisasi untuk mengadakan evaluasi terhadap semua tingkah laku orang dan apabila menemukan perilaku yang kontradiktif, berusaha untuk mendamaikannya.

Dengan demikian, mereka berperan sebagai juru damai untuk bagi pihak-pihak yang bertentangan (Jaspin, 2021).

Berikut elemen kepemimpinan yang harus ada pada sosok seorang pemimpin:



1. Pengaruh seorang Pemimpin;
2. Para pengikut;
3. Keinginan;
4. Perubahan;
5. Integritas; dan
6. Tujuan Bersama (Nilasari, 2023)

Terdapat enam elemen yang ada, seperti pemimpin harus mampu memberi pengaruh, berkeinginan, memiliki pengikut, berperubahan, mempunyai tujuan yang sama, dan berintegritas (Nilasari, 2023).

3. Teori *Good Governance*

Teori good governance atau teori tata kelola yang baik adalah pendekatan konseptual yang menguraikan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Teori ini berfokus pada tata kelola yang memastikan bahwa pemerintah atau organisasi bertindak sesuai dengan kepentingan publik, memenuhi hak-hak warga negara, dan menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif. Teori good governance berkembang sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam pemerintahan, seperti korupsi, ketidakadilan, dan inefisiensi (Dwiyanto, A. 2021).

Ada beberapa prinsip dasar dari teori good governance, seperti Keterbukaan dan Transparansi. Keterbukaan berarti bahwa informasi dan proses pengambilan keputusan mudah diakses oleh publik, sehingga masyarakat dapat memahami di balik keputusan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Transparansi ini juga menciptakan pengawasan publik terhadap proses yang ada, mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Dwiyanto, A. 2021).

Selanjutnya Akuntabilitas, Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat pemerintah atau pemimpin organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Hal ini meliputi pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja, serta adanya sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran. Akuntabilitas juga terkait erat dengan kepercayaan publik terhadap institusi (Rohman, A., & Trihardianto, W. T. 2019).

Prinsip Partisipasi, Prinsip ini menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang inklusif menjamin bahwa semua kelompok, termasuk yang rentan atau marginal, memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dengan adanya partisipasi, keputusan yang diambil akan lebih mencerminkan kepentingan bersama. Selanjutnya prinsip Penegakan Hukum (Rule of Law), Pemerintahan yang baik selalu menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hukum diterapkan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Supremasi hukum melindungi hak-hak warga negara dan memastikan adanya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Rohman, A., & Trihardianto, W. T. 2019).

Prinsip Efisiensi dan Efektivitas, Teori good governance menekankan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil terbaik. Efisiensi memastikan bahwa waktu, dan tenaga dimanfaatkan secara bijaksana, sementara efektivitas memastikan bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai sesuai dengan harapan (Rohman, A., & Trihardianto, W. T. 2019).

Prinsip Kesetaraan dan Inklusivitas, Tata kelola yang baik mendorong terciptanya lingkungan yang setara dan inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat Pembangunan (Rohman, A., & Trihardianto, W. T. 2019).

Prinsip Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat, Pemerintah dan organisasi harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yang berarti dapat menanggapi perubahan dan menyesuaikan kebijakan dengan cepat. Responsivitas meningkatkan kepuasan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat (Gunawan, R. M. B. 2021).

Terakhir prinsip, Konsensus dalam Pengambilan Keputusan, Teori good governance menekankan pentingnya mencari konsensus dalam pengambilan keputusan, terutama jika ada kepentingan yang saling bertentangan. Pendekatan ini menciptakan stabilitas sosial dan menghindari konflik dengan cara mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh banyak pihak (Gunawan, R. M. B. 2021).

Protected by PDF Anti-Copy Free

Dalam praktiknya, teori *good governance* diterapkan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, perusahaan, dan lembaga internasional. Banyak organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Bank Dunia, mendorong prinsip-prinsip *good governance* sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki tata kelola di negara-negara berkembang, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan global. Berikut beberapa definisi *good governance* menurut para ahli:

Tabel 2.3 Definisi *Good Governance* menurut para ahli

Referensi	Deskripsi
United Nations Development Programme (UNDP)	Menurut UNDP, <i>good governance</i> adalah tata kelola yang mengarahkan proses dan struktur yang memungkinkan pemerintah atau lembaga memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif, akuntabel, dan responsif. Tata kelola ini mencakup partisipasi, transparansi, responsivitas, supremasi hukum, dan keadilan.
World Bank	World Bank mendefinisikan <i>good governance</i> sebagai pengelolaan yang efektif dan efisien atas sumber daya publik untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan politik dalam sebuah negara. Prinsip-prinsip utama mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Indonesia	Menurut BPKP, <i>good governance</i> adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup nilai-nilai dasar seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum yang diterapkan dalam seluruh proses dan struktur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Sheng (2007)	Sheng menyatakan bahwa <i>good governance</i> adalah cara pemerintah mengelola sumber daya publik yang efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sheng juga menambahkan bahwa <i>good governance</i> membutuhkan partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan penerapan hukum secara adil.
Kooiman (2003)	Menurut Kooiman, <i>good governance</i> adalah sebuah sistem yang mampu menciptakan interaksi dinamis antara pemerintah dan masyarakat. Dalam interaksi tersebut, pemerintah mampu mendengarkan,

Referensi	Deskripsi
	memahami, dan merespons kebutuhan masyarakat, sehingga tercapai keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan.
Rondinelli dan Cheema (2003)	<i>Good Governance</i> menurut Rondinelli dan Cheema adalah pengelolaan kekuasaan politik dan administrasi untuk mencapai kesejahteraan, yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Mereka menekankan bahwa <i>good governance</i> juga melibatkan koordinasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Dwiyanto (2003)	Menurut Dwiyanto, <i>good governance</i> adalah tata kelola yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa <i>good governance</i> melibatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mewakili kepentingan publik.
Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2009)	Ketiganya mendefinisikan <i>good governance</i> sebagai tradisi dan institusi yang meliputi cara otoritas pemerintah digunakan dalam suatu negara untuk pengelolaan sumber daya. Mereka mengukur <i>good governance</i> melalui indikator seperti kontrol terhadap korupsi, efektivitas pemerintahan, kualitas regulasi, dan supremasi hukum.

Gunawan, R. M. B. (2021)

Berikut adalah indikator yang mewakili good governance, indikator ini dapat diterapkan dalam pengukuran:

Tabel 2.4. Indikator *good governance*

Akuntabilitas (Accountability)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya mekanisme pertanggung jawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemimpin atau pejabat. b. Transparansi dalam pengelolaan dana publik atau sumber daya. c. Laporan kinerja yang terbuka dan dapat diakses publik. d. Proses peninjauan atau evaluasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Transparansi (Transparency)	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. b. Proses pengambilan keputusan yang terbuka dan dapat diikuti oleh publik.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Pengungkapan data dan dokumen publik, seperti laporan keuangan, anggaran, dan kebijakan. d. Penerapan kebijakan yang jelas mengenai akses informasi publik.
Partisipasi (Participation)	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui konsultasi publik. b. Kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi, termasuk kelompok rentan. c. Mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan atau kritik d. Adanya perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat dalam perumusan kebijakan.
Penegakan Hukum (Rule of Law)	<ul style="list-style-type: none"> a. Supremasi hukum diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi. b. Kemandirian lembaga penegak hukum dan peradilan. c. Proses hukum yang transparan, adil, dan konsisten bagi semua orang. d. Sanksi tegas bagi pelanggaran hukum, baik untuk publik maupun pejabat.
Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness)	<ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. b. Pemanfaatan anggaran dan aset secara tepat sasaran. c. Kebijakan dan program yang berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. d. Pengurangan pemborosan waktu, biaya, dan tenaga dalam pelayanan publik.
Responsivitas (Responsiveness)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan pemerintah atau organisasi untuk menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. b. Adanya saluran komunikasi yang memadai antara pemerintah dan masyarakat. c. Tanggap terhadap situasi atau krisis yang muncul. d. Fleksibilitas dalam kebijakan untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat.
Kesetaraan dan Inklusivitas (Equity and Inclusiveness)	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau rentan. b. Kesempatan yang setara bagi semua orang

	untuk mengakses layanan dan sumber daya. c. Perlindungan hak-hak kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal. d. Penerapan kebijakan inklusif dalam semua aspek pembangunan.
Orientasi Konsensus (Consensus-Oriented)	pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok. b. Upaya untuk mencapai kesepakatan yang luas dalam isu-isu strategis. c. Penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat melalui dialog dan negosiasi. d. Kebijakan yang didukung oleh mayoritas masyarakat.

Gunawan, R. M. B. (2021).

4. Pungutan Liar

"Pungutan liar" atau sering disingkat menjadi "pungli" adalah tindakan pengenaan biaya atau pungutan secara ilegal yang dilakukan oleh oknum tertentu, baik di lembaga pemerintahan maupun di sektor publik lainnya. Pungli biasanya dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan seringkali memberatkan masyarakat. Misalnya, dalam pelayanan publik, seseorang bisa diminta membayar sejumlah uang tambahan agar urusannya lebih cepat selesai atau agar mendapatkan layanan tertentu (Hot, 2017).

Pungli memiliki dampak negatif bagi masyarakat karena mengganggu akses terhadap pelayanan yang seharusnya bisa diperoleh secara gratis atau dengan biaya yang sudah diatur. Pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus berupaya memberantas pungli melalui pengawasan, penegakan hukum, dan pembentukan satuan tugas khusus seperti *Saber Pungli* (Sapu Bersih Pungutan

Liar). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan bersih dari tindakan korupsi (Hot, 2017).


Tindakan melawan pungli hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Melapor ke pihak yang menemuhi praktik tersebut adalah salah satu langkah penting untuk membantu mengurangi dan mencegah tindakan pungli di sekitar kita (Marpaung, L. 1992).

Pungutan liar (pungli) memiliki berbagai dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan. Berikut beberapa dampak utamanya (Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. 2019):

1. Meningkatkan Beban Ekonomi Masyarakat. Pungli seringkali mengharuskan masyarakat membayar lebih untuk layanan yang sebenarnya bisa diperoleh secara gratis atau dengan biaya resmi. Hal ini tentu saja memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang mengandalkan layanan publik.
2. Menghambat Akses terhadap Layanan Publik. Pungli dapat memperlambat dan menghalangi akses masyarakat ke layanan penting, seperti pembuatan KTP, SIM, izin usaha, atau pengurusan surat-surat lainnya. Masyarakat yang tidak mampu membayar pungli mungkin mendapatkan layanan yang tidak optimal atau harus menunggu lebih lama.
3. Menurunkan Kepercayaan terhadap Pemerintah. Praktik pungli, terutama jika dilakukan oleh aparat pemerintah, merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa pemerintah tidak mampu menyediakan pelayanan yang adil dan transparan.

4. Mendorong Pertumbuhannya Budaya Korupsi. Jika pungli dibarengi dengan korupsi, maka hal ini bisa memupuk budaya korupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Pungli sering kali menjadi "pintu masuk" bagi praktik korupsi yang lebih besar dan sistemik.
5. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi. Pungli yang terjadi pada sektor usaha, misalnya dalam pengurusan izin atau perizinan usaha, dapat menghambat pertumbuhan bisnis. Biaya tambahan yang tidak resmi ini menambah beban operasional perusahaan, sehingga membuat iklim investasi menjadi tidak kondusif dan mempersulit pengembangan usaha kecil dan menengah.
6. Mengurangi Efisiensi dan Produktivitas. Pungli sering kali membuat proses pelayanan menjadi lebih lambat karena proses yang seharusnya mudah malah dihambat untuk "memaksa" masyarakat membayar pungutan tambahan. Hal ini mengurangi efisiensi dan produktivitas layanan publik.
7. Menyebabkan Ketidakadilan Sosial. Pungli cenderung memberikan keuntungan bagi mereka yang mampu membayar, sehingga masyarakat yang kurang mampu seringkali menerima perlakuan yang tidak setara. Ini menimbulkan kesenjangan sosial yang lebih besar.

Secara keseluruhan, pungli merusak tata kelola pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat. Inilah sebabnya mengapa berbagai negara, termasuk Indonesia, melakukan upaya pemberantasan pungli melalui kebijakan dan pengawasan ketat. Dalam pemerintahan, pungutan liar (pungli) dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Beberapa bentuk kegiatan pungli yang sering ditemukan antara lain (Rukmawana, dkk 2021; Ariasa, dkk 2020):

1. Pungutan untuk Mempercepat Proses Administrasi. Petugas terkadang meminta "uang tambahan" agar proses administrasi seperti pembuatan KTP, SIM, paspor, atau dokumen lain bisa dipercepat. Tanpa membayar pungli, proses bisa diperlambat atau bahkan diabaikan.
2. Pungutan saat Penegakan Hukum. Dalam beberapa kasus, oknum penegak hukum melakukan pungli ketika menilang atau menangani kasus hukum. Mereka mungkin meminta sejumlah uang agar pelanggaran bisa "diloloskan" atau hukuman bisa diringankan, yang jelas tidak sesuai prosedur resmi.
3. Pungutan di Pelayanan Publik. Layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi sering menjadi target pungli. Misalnya, saat berobat di rumah sakit atau puskesmas pemerintah, petugas bisa meminta biaya tambahan di luar tarif resmi. Hal ini juga bisa terjadi di sekolah atau dalam pengurusan transportasi umum.
4. Pungutan pada Proses Pengurusan Izin dan Perizinan. Untuk mendapatkan izin usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), atau izin lainnya, beberapa oknum bisa meminta biaya tambahan di luar biaya yang sudah diatur. Tanpa pembayaran pungli, izin tersebut bisa saja sulit didapat atau lama prosesnya.
5. Pungutan pada Program Bantuan Pemerintah. Bantuan sosial, bantuan pendidikan, atau subsidi lainnya sering disalurkan melalui perangkat desa atau aparaturnya. Beberapa oknum dapat meminta pungli dengan

alasan administrasi atau distribusi, yang akhirnya mengurangi jumlah bantuan yang diterima masyarakat.

6. Pungutan saat Rekrutmen Promosi Jabatan. Dalam rekrutmen PNS atau promosi jabatan, punli dilakukan dengan meminta sejumlah uang agar seseorang diterima menjadi pegawai negeri atau mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Praktik ini menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk kualitas SDM di instansi pemerintah.
7. Pungutan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam proyek pemerintah, punli sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penyedia barang atau jasa bisa dikenakan punli agar memenangkan kontrak atau mendapatkan proyek, yang berdampak pada kualitas proyek karena biaya tambahan di luar anggaran resmi.
8. Pungutan dalam Pelayanan Pertanahan dan Sertifikat Tanah. Dalam pengurusan sertifikat tanah atau pembebasan lahan, beberapa oknum bisa meminta punli. Hal ini sering menjadi masalah dalam pengurusan lahan dan sertifikat yang rumit.
9. Pungutan di Lingkungan Pajak dan Retribusi. Beberapa oknum petugas pajak atau retribusi dapat meminta punli untuk memberikan potongan atau keringanan yang sebenarnya tidak sesuai aturan. Hal ini menciptakan ketidakadilan di kalangan wajib pajak.

Protected by PDF Anti-Copy Free

Bentuk-bentuk pungli ini merusak sistem pelayanan publik, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan membebani ekonomi. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan pungli terus menjadi fokus bagi pemerintah, dengan adanya inspeksi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat untuk melapor jika menemui praktik pungli (Rukmawana, dkk 2021; Ariasa, dkk 2020).



B. Hasil Penelitian yang Relevan

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Tabel 2.5 Hasil penelitian terdahulu yang relevan


No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	<p>Pencegahan Korupsi Dengan Mengutamakan Peran Kepemimpinan Lokal Yang Berakhlak, Kreatif, Solutif Dan Inspiratif Di Bangka Belitung</p> <p>Abdul Rasyid Saliman</p>	 <p>Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni; jenis bahan primer dan bahan sekunder. Jenis bahan primer, yakni jenis bahan yang didapat berdasarkan hasil lapangan dengan wawancara terhadap tokoh-tokoh masyarakat (keyperson) dan sifatnya sebagai pelengkap (komplementer), sedangkan jenis bahan sekunder merupakan jenis bahan yang di dapat bukan dari lapangan</p>	<p>Penulis meyakini dimasa yang akan datang Provinsi Bangka Belitung ini akan menjadi titik simpul pusat perputaran bukan hanya modal yang besar di Asia Tenggara dan Asia Pasifik, dimana Provinsi Bangka Belitung dapat menjadi pemain dan bukan hanya objek semata dari perputaran tersebut, dari hasil penelitian hasil pertambangan, perkebunan pertanian sawit kerentanan harga komoditas secara terus menerus tidak di kelola secara baik akan mengakibatkan semakin tingginya tingkat kriminalitas dibidang ekonomi dikalangan masyarakat pada umumnya, seperti illegal logging, illegal mining dan lain-lain yang akan semakin memperburuk kondisi social ekonomi masyarakat dan masalah korupsi di Bangka Belitung terkaiterat dengan berbagai persoalan ekonomi.</p>
2.	<p>Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Birokrasi Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara</p> <p>Hernita Hardiyanti</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah penelitan deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan di lapangan dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Secara garis besar penelitian deskriptif memiliki tujuan memberikan gambaran tentang situasi yang berhubungan dengan masyarakat tertentu sehingga data yang</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa kinerja pelayanan aparatur birokrasi di Kecamatan Samboja kurang baik. Dapat di lihat dari aparatur yang masih belum tepat waktu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, kurangnya keterampilan yang di miliki aparatur birokrasi, masih kurangnya koordinasi dan kerjasama para staf dan pegawai serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasi penyimpangan dan</p>

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	<p>(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)</p>	<p>diberikan akan lebih akurat tentang kejadian yang dipel</p>	<p>KKN</p>
<p>3.</p>	<p>Peran ASN Milenial Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Era Digital</p> <p>Yunita Ratna Sari, Nike Mutiara Fauziah</p>	<p>Buku merupakan hasil penelitian dan pemikiran terkini melalui proses seleksi naskah awal dari para penulis baik dari lingkungan UPN "Veteran" Jawa Timur maupun dari berbagai instansi lain.</p>	<p>Persoalan-persoalan pelayanan publik saat ini di Indonesia masih seringkali terjadi. Kekhususan dari pelayanan publik adalah fokus pada kepentingan publik daripada kepada kepentingan pribadi. Praktik maladministrasi yang paling banyak berkaitan dengan penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, penyimpangan prosedur dan pungutan liar. (Ombudsman RI, 2021- 2022)</p>
<p>4.</p>	<p>Peran Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai Di Badan Penanaman Modal Daerah (Bpmd) Kabupaten Kutai Timur</p> <p>Rofiqoh Istiharoh</p>	<p>Berdasarkan obeservasi awal peneliti pada situs penelitian tugas di Kantor Badan Penanaman Modal Daerah</p>	<p>Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan obeservasi awal peneliti pada situs penelitian terlihat bahwa pelaksanaan tugas di Kantor Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD tidak seluruhnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adakalanya tugas-tugas di Kantor Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD terbelengkalai diakibatkan karena adanya pegawai sering tidak masuk kerja, atau berada diluar kantor pada jam dinas Dan masih tingginya kasus pungutan liar, karena kurang efektifnya kebijakan pencegahan pembalikan liar dan lain-lain.</p>
<p>5.</p>	<p>Kepemimpinan Fx.Hadi Rudyatmo Dalam Mewujudkan Solo Kota Layak Anak</p> <p>Yunita Ratna</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif untuk mendeskripsikan dan menggali secara mendalam terkait Kepemimpinan FX.Hadi Rudyatmo dalam</p>	<p>Dari hasil penelitian adanya biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli). Omdusman RI mendapati adanya praktik pungutan liar pada pelayanan pembuatan KTP elektronik yang tersebar di 12 Provinsi</p>

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	<p>Sari (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)</p>	<p>mewujudkan Solo, Kota Layak Anak. Informan dalam penelitian ini meliputi Walikota Solo (FX. Rudyatmo), Badan Perencanaan dan Pembangunan. Data-data yang diperoleh penulis adalah Data Primer(diperoleh melalui wawancara)dan data sekunder (diperoleh melalui analisis dokumen seperti modul profil anak). Data yang telah diperoleh diuji menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu sumber dengan data yang di dapat dari sumber lain.</p>	<p>antara lain Provinsi Banten,Bengkulu, Jambi,Jawa Barat,Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Selatan. Jumlah pungutan liar dalam pelayanan KTP elektronik itu bervariasi, paling tinggi Rp 300 ribu per orang</p>
6.	<p>Peranan Camat Dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.</p> <p>Anwar Sadat</p>	<p>Metode penelitian melalui Reformasi yang di latar belakang oleh praktik KKN dilapangan.</p>	<p>Dari metode penelitian dan mengingat kemunculannya di saat penyelenggaraan pemerintah indonesia sedang mengalami distorsi terhadap efektifitas pelayanan kepada publik, dalam arti bahwa sudah bukan menjadi rahasia umum apabila berurusan dengan birokrasi pemerintah yang di alami berbelit-belit sangat lambat, penuh dengan pungutan liar, pelayanan yang kurang baik dan lain-lain. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat</p>
7.	<p>Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik</p>	<p>Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan</p>	<p>Peran Diretkrimsus dalam menanggulangi pungutan liar melakukan dengan cara tindakan represif berupa penyidikan yang dilakukan</p>

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Direktorat Kriminal Khusus Laurensius Arliman S	yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif. Tulisan mengenai peran penyidik Diretkrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menangani tindak pidana perkara korupsi dalam hal tertangkap tangan melakukan pungutan liar menggunakan metode penelitian deskriptif.	Polri dalam pemberantasan pungutan liar dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Artinya bahwa pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi pungutan liar yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
8.	Peran Pimpinan Universitas Dalam Mempromosikan Keadilan Sosial Dan Kesetaraan Bagi Mahasiswa Nailul Izzati, Amiruddin, Millati Suci Affa	Berdasarkan studi kasus atau penelitian yang dilakukan dan terjadi dilapangan. Temuan penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa dari latar belakang ekonomi rendah dan kelompok minoritas.	Dari hasil penelitian Pentingnya untuk mencatat bahwa promosi keadilan sosial dan kesetaraan di lingkungan universitas dapat membantu mencegah atau mengurangi risiko korupsi. Ketika ada ketimpangan dalam perlakuan atau kesempatan, kemungkinan terjadinya korupsi bisa menjadi lebih tinggi. Misalnya, jika ada kecurangan dalam proses penerimaan mahasiswa, favoritisme dalam penilaian akademik, atau pungutan liar untuk mendapatkan fasilitas atau izin tertentu
9.	Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan	Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (field research). Penelitian lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang sebenarnya.	Berdasarkan hasil penelitian dari fokus masalah yang telah dikaji melalui wawancara dan observasi, penulis menyimpulkan bahwa Peran Pemerintah melalui Dishub Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penanggulang pungutan liar parkir menggunakan dua metode yang bersifat Preventif dan Represif yaitu penanggulangan pungutan

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
	Kota Bandar Lampung Galang Dharma Jolian		liar parkir baik sebelum dan sesudah terjadi. Penanggulangan ini dengan melakukan imbauan-imbauan dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak pelayanan publik agar masyarakat dapat mengetahui persoalan-persoalan ini secara tuntas. Dan juga melakukan upaya-upaya pengawasan di setiap lahan parkir untuk mengurangi tindakan-tindakan pungutan liar parkir.
10.	Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Mencegah Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik Pandji Ndaru	Metode penelitian berdasarkan hasil lapangan dan realita dimasyarakat	Upaya pencegahan dan pemberantasan pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah masih cenderung menggunakan cara-cara penindakan (represif), dalam hal ini kinerja yang dilakukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menunjukkan progres atau kemajuan dalam pemberantasan tindak pidana pungutan liar, namun jika ditinjau lebih jauh lagi, hal ini justru menunjukkan bahwa semakin banyaknya Aparatur Sipil Negara yang ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan.

A. Rancangan Penelitian



Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian berjenis kualitatif dengan tipe deskriptif yang menggunakan analisis miles and hubberman (Sardiyo dan Rimbano D, 2022). Sebaran responden penelitian tersebar di berbagai Pasar Permiri Kota Lubuklinggau.

Rancangan pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dimana penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu penelitian yang memandu dan mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sardiyo dan Rimbano D, 2022).

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (Sugiyono, 2013).

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Peran kepemimpinan dalam menghadapi pungutan liar di pasar permiri, yang lebih terfokus bagaimana peran pemimpin dan strategi kedepan pemimpin tersebut dalam memberikan Solusi jangka menengah dan panjang.

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Sugiyono, (2013) mengatakan, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskriptif untuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sardiyo dan Rimbano D, 2022).

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Lubuklinggau yang tersebar di berbagai wilayah Pasar Permiri, dengan subjek pengamatan pada:

1. Kelurahan Pasar Permiri Pemerintah Kota Lubuklinggau;
2. Para stakeholders terkait;
3. Masyarakat pelaku Usaha/UMKM; dan
4. Instansi lain dan Lingkungan sekitar yang mempunyai peran.

C. Metode dan Prosedur Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan tipe analisis deskriptif menggunakan analisis miles and hubberman (Sardiyo dan Rimbano D, 2022). Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013) metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok.

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Penelitian kuantitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Menurut Sugiyono (2013) mengemukakan tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci. Menurut Arikunto, (2020) mengatakan bahwa prosedur dalam melaksanakan penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Pertama, Mengumpulkan data Peneliti langsung di mngumpulkan data yang berkaitan dengan Peran kepemimpinan dalam menghadapi pungutan liar di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau.
2. Kedua, Mengolah data Peneliti melakukan inventarisir data yang ditemukan yang sesuai dengan sub fokus penelitian yang ditetapkan. Peneliti melakukan pengkodean, mentranskrip hasil wawancara dan mengubah data sekunder yang masih bersifat data mentah.
3. Ketiga, Menganalisis data Peneliti menyajikan data yang sedemikian rupa dapat dianalisis untuk mengetahui keterkaitan-keterkaiannya. Untuk menganalisis data, peneliti tetap mengacu pada konsep dan teori-teori yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya.
4. Keempat, Merumuskan simpulan Setelah melakukan proses analisis data, peneliti membuat kesimpulankesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Kesimpulan merupakan hasil dari abstraksi dari kesimpulan-kesimpulan khusus yang telah diinventarisir dari hasil analisis data.

D. Data dan Sumber Data

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dan diambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Data ini mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, vidiotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik wawancara, dimana peneliti akan mengumpulkan informan untuk merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan tertulis maupun lisan (Sardiyo dan Rimbano D, 2022).

Sumber data adalah subjek utama dalam proses penelitian masalah diatas. Menurut Sugiyono, (2013) adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Sumber data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber baik secara Internal maupun secara Eksternal. Dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, brosur dan artikel yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian ini. Adapun sumber data yang diambil adalah hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan subfokus penelitian seperti:

1. DUK Pegawai Pasar Permiri Kota Lubuklinggau;
2. Data Kinerja Pegawai Pasar Permiri Kota Lubuklinggau;
3. Data keluhan dan saran atas layanan kerja Pegawai Pasar Permiri Kota Lubuklinggau; dan
4. Hal-hal lain yang berhubungan dengan sub fokus penelitian.

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data Penelitian ini dilakukan secara primer dan sekunder (Sardiman, 2012; Rimbano D, 2022), secara sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data-data publikasi, data-data laporan dari Lembaga resmi terkait dan berhubungan dengan tema penelitian, dan secara primer melakukan wawancara dengan:

Informan Penelitian

No	Informan	Jenis
1	Internal: Pegawai Kelurahan Pasar Permiringan	Informan 1
2	Internal: Pegawai Kelurahan Pasar Permiringan	Informan 2
3	Internal: Pegawai Kelurahan Pasar Permiringan	Informan 3
4	Eksternal: Stakeholders Terkait	Informan 4
5	Eksternal: Stakeholders Terkait	Informan 5
6	Eksternal: Stakeholders Terkait	Informan 6
7	Eksternal: Masyarakat Sekitar	Informan 7
8	Eksternal: Masyarakat Sekitar	Informan 8
9	Eksternal: Instansi terkait lainnya	Informan 9
10	Eksternal: Instansi terkait lainnya	Informan 10

Total yang akan di wawancari sebanyak sepuluh (10) responden yang tersebar di berbagai jenis kriteria. Dalam memudahkan proses wawancara kepada para narasumber, maka penulis membuat borang wawancara,

F. Prosedur Analisis Data

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Prosedur analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dengan analisis miles and hubberman (Sugiyono, 2019). Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengolahan data dari transkripsi wawancara, catatan lapangan dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materimateri tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain (Sardiyo dan Rimbano D, 2022). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Menurut Sugiyono, (2013) yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, atau gabungan ketiganya (triangulasi).

2. Reduksi Data


Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga dapat memberikan gambaran secara jelas dan dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.

3. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk

Protected by PDF Anti-Copy Free
menahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang kan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

G. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengendalian kualitas atau *maintaining quality* bertujuan untuk memastikan proses analisa data dapat membuktikan bahwa data yang didapatkannya itu tidak subjektif dan memiliki kualitas yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Arikunto, 2020). Apabila data yang dihasilkan baik maka temuan juga akan menjadi baik, sehingga dalam penelitian perlu menjaga kualitas penelitian. Peneliti wajib untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses analisa yang dilakukan dan temuan yang dihasilkan terbebas dari unsur bias dan subjektifitas (Sugiyono, 2013).

1. Uji *Credibility*

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan oleh peneliti antara lain dengan:

- Protected by PDF Anti-Copy Free**
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
- a) Perpanjangan Pengamatan Fokus pada pengujian kredibilitas ini adalah pada pengujian data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak. Apabila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar maka data kredibel dan waktu perpanjangan pengamatan diakhiri;
- b) Triangulasi Sumber Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimiliki. Dalam hal ini penelitian akan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara menguji kredibilitas data dengan membandingkan data yang diperoleh dari para informan mengenai topik penelitian untuk kemudian dianalisis sehingga didapatkan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Kemudian dilakukan triangulasi metode. Triangulasi metode adalah usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara *check and recheck*.

2. Uji *Transferability*

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Bagaimana cara peneliti mentransfer data yang sudah didapatkan agar hasil penelitian kualitatif dapat mudah dipahami orang lain. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, sampai mana hasil penelitian dapat diterapkan dalam situasi lain. Oleh karena itu agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif dan agar orang lain dapat memutuskan untuk dapat menerapkan hasil penelitian tersebut atau tidak maka peneliti dalam membuat laporannya harus dengan memberikan uraian yang rinci, sistematis, jelas dan dapat dipercaya.

3. Uji *Dependability*

Penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Penelitian dipastikan bersifat konsisten dan dapat dilakukan kembali sehingga peneliti dapat menjaga kualitas penelitian. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan cara kerjasama peneliti dan pembimbing penelitian untuk melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan bahwa peneliti melakukan aktifitas lapangan dan dapat bertanggung jawab atas seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan.

H. Tempat dan Waktu Penelitian

Tabel 3.2 *Timeline* Penelitian

No	Keterangan	Tahun 2024					
		Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
1	Pengajuan Judul, Bedah Judul dan Perbaikan	X					

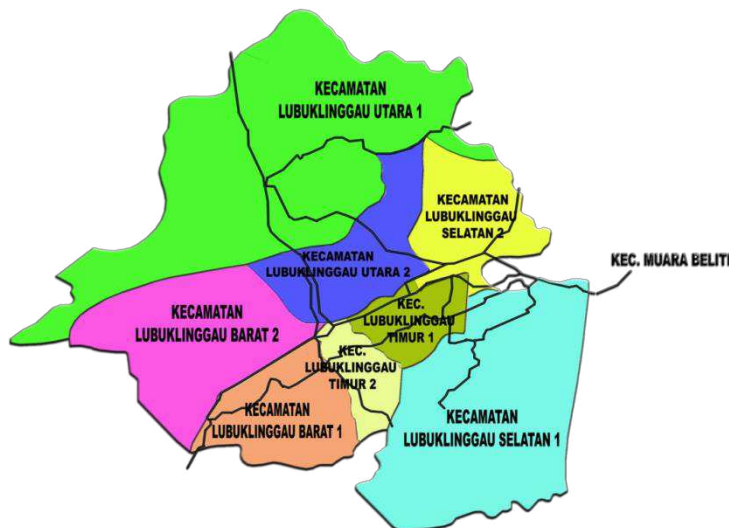
Protected by PDF Anti-Copy Free

No	Keterangan	Tahun 2024					
		Sept.	Okt.	Nov.	Des.	Jan.	Feb.
2	Penyusunan Proposal		X	X			
3	Bimbingan Proposal		X	X	X		
4	Ujian Proposal			X	X		
5	Pengumpulan dan Ana				X		
6	Bimbingan Tesis				X	X	X
7	Ujian Tesis						X



A. Gambaran Umum Penelitian

Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan LubukLinggau BARAT II merupakan salah satu SKPD yang ada di wilayah pemerintahan Kota LubukLinggau yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota LubukLinggau No. 5 Tahun 2008. Kecamatan Lubuklinggau BARAT II terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan dalam wilayah Kecamatan. Adapun masing-masing Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Lubuklinggau Barat II dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Peta Kecamatan dalam Wilayah Kota Lubuklinggau

Secara Geografis Kelurahan Pasar Permiri memiliki luas wilayah 25,37

Ha. Dengan Batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kelurahan Lubuklinggau Ulu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Bandung Kiri
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Bandung Kanan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Jawa Kanan SS

Visi Misi Kelurahan Pasar Permiri

Visi : Terdepan dalam memberi Pelayanan kepada Masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan masyarakatan.

Misi : Meningkatkan Warga Masyarakat dibidang Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan

Secara administratif, pada Tahun 2024 Kelurahan Pasar Permiri memiliki struktur organisasi, yang terdiri dari 1 (satu) Orang Lurah, 1 (satu) Orang Sekretaris Lurah, 3 (Tiga) Orang Kepala Seksi (Kasi Pemerintahan & Trantib, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi pelum dan Kesos), 1 (satu) Orang staf TKS dan 6 (Enam) Orang Ketua Rukun Tetangga. Jumlah Pemerintahan terendah di Kelurahan Pasar Permiri berdasarkan satuan lingkungan setempat terdiri dari 6(Enam) Rukun Tetangga (RT).

Jumlah penduduk di Kelurahan Pasar Permiri pada Tahun 2020 adalah 2011 jiwa terdiri 1022 jiwa perempuan dan 989 jiwa laki-laki dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 630 KK dengan Penduduknya Mayoritas bermata Pencaharian Pedagang . Diwilayah Kelurahan Pasar Permiri secara sektor Keagamaan dan sejarah/budaya berdiri kokoh Masjid Agung As-Salam yg juga menjadi Icon Kota Lubuklinggau mengingat Letak Strategisnya yg berada di Tengah Kota Lubuklinggau di Wilayah Kelurahan Pasar Permiri, berdampingan dengannya Terdapat Museum Subkoss Garuda Lubuklinggau.

Sesuai dengan falsafah Negara Republik Indonesia. Pancasila dan UUD 1945 memiliki peranan terhadap kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan

dalam kehidupan beragama yang diarahkan kepada peningkatan akhlak untuk
Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
kepentingan bersama dan membangun masyarakat serta dapat mengatasi
berbagai masalah dalam kehidupan antar umat beragama.

Kedudukan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan sesuai dengan Undang-
undang terbaru tentang Pemerintahan Daerah yaitu Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana disebutkan dalam pasal 120 dan pasal 126, bahwa
Kecamatan/Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah
Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan/Kepala Kelurahan yang disebut
Camat/Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya.

Kelurahan sebagai satuan perangkat daerah dipimpin oleh seorang Lurah
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelayanan
umum di wilayah kerjanya sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan oleh
Walikota.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kelurahan menjalankan fungsi
sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban;
3. Mengkoordinasikan Penerapan Peraturan Perundang – Undangan;
4. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan Umum;
5. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
6. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan; dan



7. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya Dan Atau Yang Belum Dapat Dilaksanakan Pemerintahan Kelurahan



Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasi penyusunan program kerja, sesuai dengan kegiatan masing-masing seksi dalam rangka menyatukan pencapaian program visi dan misi;
2. Membagi tugas dan mengikuti perkembangannya dengan cara memantau agar penyelesaian tugas tepat waktu;
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dengan cara memberi petunjuk dan motivasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal dan disiplin;
4. Meneliti dan merumuskan rencana kerja tahunan sebagai pedoman kerja;
5. Meneliti dan mengarahkan naskah-naskah dinas kepada seksi sesuai disposisi pimpinan;
6. Meneliti bentuk format, redaksional naskah-naskah dinas keluar sebelum ditanda tangani pimpinan;
7. Melakukan pembinaan administrasi dan disiplin kepegawaian;
8. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kebutuhan sarana dan prasarana;
9. Mengawasi dan mengendalikan kebutuhan pengelolaan keuangan;
10. Mengevaluasi hasil verifikasi laporan pertanggung jawaban keuangan atas penyerapan keuangan; dan
11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

Protected by PDF Anti-Copy Free
Keseluruhan program yang akan dikelola Kelurahan Bendogerit selama

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
1 tahun ke depan (Tahun 2024) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan  elurahan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis  adu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.




Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program – program Kelurahan adalah sebagai berikut;

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dan PMKS lainnya
6. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Pemerintah
9. Program Pengembangan Data /Informasi/Statistik Daerah
10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

B. Hasil Penelitian

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


Tabel 4.1 REKAPAN WAWANCARA

No	Pertanyaan Wawancara	DOKUMENTASI
1	<p>Menurut anda, apakah kepemimpinan di pasar permiri telah berjalan secara BERAKHLAK; K = Kreatif; S = Solutf; I = Inspiratif)? Ya, Berakhlak, Kreatif dalam melakukan kegiatan dilapangan baik dari Pasar Maupun di tengah masyarakat</p>	
2	<p>Berikan contoh bentuk yang anda rasakan bahwa kepemimpinan lurah telah berjalan secara BERAKHLAK? Dengan memberikan contoh yang Baik Kepada masyarakat serta mengayomi masyarakat dalam segi Keagamaan,Sosial agar masyarakat lebih baik.</p>	
3	<p>Berikan contoh bentuk yang anda rasakan bahwa kepemimpinan lurah telah berjalan secara KREATIF?ada banyak kretitifitas yang disalurkan melalui Pelatihan UMKM , Kerajinan Tangan serta Pelaku usaha bagaimana mengajarkan kretifitas dalam berinovasi memberikan ide gagasan pokok terbaru .serta dalam lingkup di pasar pemimpin yang mendorong Segala Steakholder,masyarakata serta instansi untuk berpikir kreatif dan memunculkan ide serta solusi baru untuk mengatasi masalah yang ada dipasar.</p>	



(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Pertanyaan Wawancara	DOKUMENTASI
4	<p>Berikan contoh bentuk yang anda rasakan bahwa kepemimpinan lurah telah berjalan secara SOLUTIF? Menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan Bekoordinasi baik terkait stekholder maupun instansi serta masyarakat untuk memecahkan masalah tersebut</p>	
5	<p>Berikan contoh bentuk yang anda rasakan bahwa kepemimpinan lurah telah berjalan secara INSPIRATIF? Pemimpin yang inspiratif memiliki visi yang jelas dan mampu mengkomunikasikannya dengan efektif kepada rekan kerja serta koordinasi baik instansi, stekholder, masyarakat dengan mengembangkan karakteristik dan strategi ini, seorang pemimpin dapat menginspirasi tim mereka untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi, berkolaborasi dengan lebih baik, mencapai tujuan yang baik untuk masyarakat terutama dipasar</p>	
6	<p>Apa saran Anda untuk hal ini, AGAR kepemimpinan lurah di pasar permiri telah berjalan secara BKSI (B = Berakhlak; K = Kreatif; S = Solutif; I = Inspiratif)? Dengan menjaga silaturahmi stakeholder dengan masyarakat serta menedepankan kepentingan umum</p>	
7	<p>Apa yang ada ketahui tentang <i>good governance</i>? Jelaskan Good governance suatu konsep yang mengacu pada pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, serta sejalan dengan prinsip</p>	



(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Pertanyaan Wawancara	DOKUMENTASI
	<p>demokrasi dan pasar yang efisien dan tata kelola Pemerintahan yang baik pendekatan pemerintahan kepada masyarakat</p>	
8	<p>Menurut anda, apakah kepemimpinan lurah di pasar permiri telah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>? Kepemimpinan Lurah Pasar permiri telah berjalan berdasarkan prinsi-prinsip Pemerintahan yang baik dengan terutama 1. transparan melakukan koordinasi kepada terutama distaf kelurahan baik RT,Tokoh masyarakat,Tokoh Agama Bhabinkamtibmas, babinsa transparsi dalam menyelesaikan Permasalahan serta kegiatan lainnya dengan baik. 2. Akuntabilitas prinsip dalam pelayanan publik yang meliputi kepastian dan ketepatan waktu pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan SOP pelayanan yang berlaku. 3. responsibilitas pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.4. pemerintah dikelola secara profesional tanpa</p>	


(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Pertanyaan Wawancara	DOKUMENTASI
	<p>benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat.5. Independen sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut.</p> <p>6. Fairness yaitu sama dengan setaraan Kesetaraan dan Kewajaran dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.</p>	
9	<p>Berikan contoh bentuk yang anda rasakan bahwa kepemimpinan di lurah pasar permiri telah berjalan secara <i>GOOD GOVERNANCE</i>? Dengan menerapkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, dari segi kepemimpinan dan administrasi</p>	
10	<p>Apa saran Anda untuk hal ini. AGAR kepemimpinan lurah di pasar permiri telah berjalan berdasarkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>? Pemerintahan tata kelola dengan baik,terbuka dalam informasi dengai sesuai aturan yang berlaku dengan selalu menjaga kesolitan terhadap pemerintahan dan steak holder agar masyarakat mendapatkan ruang yang baik dan positif terhadap pemerintahan.</p>	

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Pertanyaan Wawancara	DOKUMENTASI
11	<p>Menurut anda, Apa saja hambatan yang dihadapi Lurah Pasar Pemiri dalam menghadapi terjadinya kegiatan pungutan liar? Yang menjadi hambatan dalam menghadapi indikasi terjadinya pungutan liar yaitu premanisme atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengotorkan nama pemerintahan terutama pada pedagang yang takut sama preman sehingga pihak terkait tidak mendapatkan keterangan yang jelas dari pedagang mengenai siapa dan berapa kali pungutan liar terjadi ..hal ini la yang akan menjadi permasalahan banyaknya oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>	
12	<p>Menurut pengalaman anda, Berikan sebuah solusi untuk Lurah Pasar Pemiri agar dapat menghadapi indikasi terjadinya kegiatan pungutan liar? Dengan saling koordinasi bersama pemerintahan stakeholder bekerja sama berkesinambungan untuk selalu menjaga situasi yang ada di ruang lingkup dikelurahan terutama di pasar banyak terjadi pungutan liar serta kegiatan diluar yang ada kan memicu gejolak yang ada untuk itu akan ada kerja sama baik dari Stakeholder baik masyarakat,instnsni,Pol. PP, DLH dengan stakeholder yang akan menjaga pemerintahan dengan baik.</p>	

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Pertanyaan Wawancara	DOKUMENTASI
13	<p>Strategi pengawasan seperti apa yang cocok untuk Lurah Pasar Permiri Kota Lubuklinggau agar mengurangi kegiatan pungutan liar?</p> <p>Melakukan pengawasan intern terlebih dahulu mencari informasi setelah itu melakukan pemantauan terhadap pedagang pasar selalu patroli setiap harinya dan koordinasi dengan pihak terkait pemerintahan Steakholder yang ada untuk mengurangi pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak tidak berkepentingan atau oknum yang tidak bertanggung jawab.</p>	

Sumber: Wawancara, 2025

BAB V

PEMBAHASAN

A. Peran kepemimpinan Lurah di pasar permiri Kota Lubuklinggau yang Berakhlak, Kreatif, Solutif, dan Inspiratif.

Protected by PDF Anti-Copy Free
Peran kepemimpinan seorang Lurah yang berakhlak sangat penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Terutama yang ditunjukkan oleh Lurah Pasar Permiri Kota Lingsgau, dalam hal ini Lurah yang berakhlak menjadi panutan bagi masyarakat melalui sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Mempraktikkan nilai-nilai moral seperti kesederhanaan, keadilan, dan empati dalam kehidupan sehari-hari, Memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi, baik berdasarkan agama, suku, atau status sosial, dan Mengelola administrasi pemerintahan dengan transparansi dan bebas dari korupsi.

Selanjutnya, seorang Lurah harus mampu memperkuat Hubungan Sosial dalam Masyarakat, seperti menjadi penghubung yang baik antara warga dengan pemerintah daerah yang lebih tinggi, mendorong gotong royong dan solidaritas antarwarga untuk membangun lingkungan yang lebih baik, mendengarkan dan Merespons Aspirasi Masyarakat, Bersikap rendah hati dalam menerima kritik, saran, atau keluhan dari masyarakat, Mengadakan forum komunikasi atau musyawarah untuk mendiskusikan kebutuhan dan solusi bagi warga.

Kemudian, Lurah yang berakhlak juga harus siap untuk Menggerakkan Program yang Berorientasi pada Akhlak Mulia, Melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan yang memperkuat moral dan etika, Memimpin program pembangunan yang berfokus pada kesejahteraan

bersama, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, dan pengembangan pendidikan.

Tidak lupa, Lurah harus menjaga Stabilitas dan Keamanan Wilayah, dengan Membina hubungan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda untuk mencegah konflik, Mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perselisihan antarwarga, Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat Dengan menjadi pemimpin yang konsisten dalam ucapan dan tindakan, Lurah dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat.

Dengan mengimplemmentasikan peran ini, seorang Lurah yang berakhlak dapat menjadi pemimpin yang tidak hanya efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menginspirasi warganya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Perilaku berakhlak ini pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang lebih damai, sejahtera, dan bermartabat.

Peran kepemimpinan seorang Lurah yang **kreatif** di Pasar Permiri, Kota Lubuklinggau, sangat penting untuk mendukung kemajuan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan pedagang, dan menciptakan pasar yang nyaman bagi masyarakat. Lurah harus mampu Menciptakan Solusi Inovatif untuk Pengelolaan Pasar dengan Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, seperti Mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi atau gotong royong, seperti pengelompokan sampah untuk didaur ulang, melakukan Penataan Area Pasar dengan Merancang zona pasar yang lebih tertata, misalnya area khusus untuk pedagang makanan, pakaian, atau hasil bumi, sehingga memudahkan pengunjung.

Protected by PDF Anti-Copy Free
Opsir seperti dengan melakukan Digitalisasi Pasar dengan Penerapan Teknologi dalam Transaksi, Dimana Mendorong pedagang untuk menggunakan metode pembayaran digital, seperti QRIS, guna mempermudah transaksi dan mendukung pembayaran non-tunai, menyediakan Aplikasi Pasar Lokal dengan Membuat aplikasi atau platform digital untuk mempromosikan produk-produk pedagang di Pasar Permiri, sehingga dapat menjangkau pembeli lebih luas, termasuk di luar Kota Lubuklinggau.

Selanjutnya, Lurah harus mampu Meningkatkan Branding Pasar di Pasar Permiri, seperti Mengadakan Event atau Festival dengan Menggelar acara rutin seperti festival kuliner, pasar malam, atau bazar tematik untuk menarik lebih banyak pengunjung, melakukan Promosi Melalui Media Sosial dengan Membantu pedagang memasarkan dagangan mereka melalui media sosial atau marketplace lokal dengan strategi pemasaran kreatif, Mendukung Pemberdayaan Pedagang Kecil dengan aktif menyelenggarakan Pelatihan dan Workshop, seperti Mengadakan pelatihan keterampilan bagi pedagang, seperti pelatihan pengemasan, pemasaran online, atau manajemen keuangan sederhana.

Mencari mitra guna untuk mengembangkan Program Pinjaman Modal Ringan, seperti Bekerja sama dengan bank lokal untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah bagi pedagang kecil agar mereka dapat mengembangkan usaha. Lurah juga harus Menjaga Keharmonisan dan Keamanan Pasar, dengan membuat Zona Ramah Lingkungan dan Bebas Konflik, Menata ulang zona pasar untuk meminimalkan potensi konflik antar pedagang dan menciptakan ruang pasar yang ramah lingkungan, melakukan

Kolaborasi dengan Keamanan Lokal, Menggunakan teknologi, seperti kamera pengawas (CCTV), dan bekerja sama dengan Satpol PP untuk menjaga ketertiban di pasar.



Lurah juga dituntut untuk mengembangkan Ruang Publik dan Fasilitas Pasar, menyediakan Fasilitas Modern, seperti Menambahkan fasilitas umum seperti tempat duduk, toilet bersih, dan area istirahat untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, membuat Area Ramah Anak dan Keluarga dengan Menyediakan ruang bermain anak atau tempat penitipan barang bagi pembeli untuk menciptakan pasar yang ramah keluarga, Menggalakkan Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat dengan Melibatkan Komunitas Lokal, Berkolaborasi dengan komunitas seni, budaya, dan UMKM untuk memanfaatkan pasar sebagai ruang ekonomi kreatif.

Lurah harus aktif Mendengar Aspirasi Pedagang dengan Mengadakan forum atau musyawarah untuk menerima masukan dari pedagang dan masyarakat tentang pengelolaan pasar, Menghidupkan Pasar Sebagai Ikon Kota, Menggali potensi lokal, seperti menjadikan Pasar Permiri sebagai pusat oleh-oleh khas Lubuklinggau atau sentra produk unggulan daerah, Mengubah Pasar Permiri menjadi destinasi wisata belanja dan kuliner dengan daya tarik lokal yang unik. Kreativitas seorang Lurah di Pasar Permiri dapat memberikan dampak positif yang besar, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Peran kepemimpinan Lurah di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau yang juga harus **solutif**, yaitu mampu menawarkan solusi yang konkret, cepat, dan efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pedagang dan masyarakat.

Protected by PDF Anti-Copy Free
Seperti, Mengatasi Masalah Kebersihan Pasar, dengan memperkuat Sistem Pengelolaan Sampah yang Efisien, Mengadakan tempat sampah terpilah (organik dan non-organik) di seluruh area pasar dengan Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah. serta Menggalakkan program Eco Market, seperti daur ulang sampah organik untuk dijadikan kompos.

Mengatasi masalah dalam Menata Ketertiban dan Kenyamanan Pasar, khususnya Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan Membuat area khusus untuk PKL agar tidak mengganggu akses utama pasar, Memberikan izin usaha yang terorganisir untuk PKL agar mereka tetap dapat berjualan tanpa konflik dengan pedagang tetap.

Mengatasi masalah dalam Pengaturan Lalu Lintas Pasar dengan Menambah area parkir yang memadai untuk kendaraan pengunjung, Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur arus keluar masuk kendaraan di sekitar pasar, Memperbaiki Fasilitas Pasar, Memastikan atap, lantai, dan saluran air di pasar dalam kondisi baik untuk menghindari genangan air atau kebocoran, Menambahkan penerangan di seluruh area pasar untuk menciptakan rasa aman, terutama pada malam hari, Membangun toilet umum yang bersih dan terjangkau bagi pedagang serta pengunjung.

Mengatasi masalah untuk dapat mempercepat Peningkatan Ekonomi Pedagang, seperti Akses Modal Usaha dengan Berkolaborasi dengan bank lokal atau koperasi untuk menyediakan pinjaman modal dengan bunga ringan bagi pedagang kecil, Peningkatan Kapasitas Pedagang dengan Mengadakan pelatihan bisnis untuk pedagang, seperti manajemen usaha, pemasaran online,

dan pengemasan produk dengan kegiatan Pemasaran Digital, Mendorong pedagang untuk memanfaatkan teknologi, seperti media sosial dan aplikasi belanja lokal, untuk mempromosikan produk mereka.

Mengatasi masalah Keamanan dan Ketertiban Pasar dengan Pengawasan dan Keamanan yang Terintegrasi dengan Memasang kamera CCTV di titik-titik strategis pasar untuk mengawasi aktivitas, Melibatkan Satpol PP atau petugas keamanan pasar untuk mencegah tindak kriminal seperti pencurian atau pungutan liar.

Membangun mekanisme Sistem Aduan Cepat, dengan Membuat saluran pengaduan (misalnya melalui aplikasi, hotline, atau WhatsApp) agar pedagang dan pembeli dapat melaporkan masalah dengan mudah dan cepat ditangani. Menyelesaikan Konflik Secara Adil dengan Mediasi Konflik Pedagang Membentuk tim mediasi yang terdiri dari perwakilan pedagang, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk menyelesaikan konflik terkait lahan, harga, atau persaingan usaha, Mendorong penyelesaian konflik secara kekeluargaan melalui forum komunikasi antara pedagang dan pihak pengelola pasar.

Mengatasi Penurunan Jumlah Pengunjung Pasar dengan Program Inovatif untuk Menarik Pengunjung, Menyediakan area promosi khusus bagi produk lokal unggulan untuk menarik minat pembeli, Mengadakan kegiatan mingguan seperti pasar murah atau diskon kolektif bagi pengunjung, Membuat pasar lebih menarik dengan mural, taman kecil, atau area bersantai bagi pengunjung, Mempermudah Akses Informasi dan Koordinasi dengan Membuat papan pengumuman atau grup komunikasi untuk menyampaikan

informasi penting kepada pedagang, seperti jadwal pengangkutan sampah, aturan baru, atau kegiatan pasar.

Membuka kantor layanan khusus di pasar untuk membantu pedagang atau pengunjung dengan keluhan atau keluhan, melakukan Kolaborasi dengan Stakeholder melalui Kemitraan dengan Pihak Swasta dan Komunitas, Menggandeng perusahaan swasta untuk mendukung pembiayaan fasilitas pasar, Bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengadakan program pemberdayaan masyarakat berbasis pasar.

Lurah yang solutif akan mampu menciptakan pasar yang terkelola dengan baik, nyaman, dan produktif, sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal di Kota Lubuklinggau.

Peran kepemimpinan seorang Lurah yang **inspiratif** di Pasar Permiri, Kota Lubuklinggau, sangat penting untuk membangkitkan semangat pedagang, menciptakan inovasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat.

Lurah Menjadi Panutan bagi Pedagang dan Masyarakat, Mempraktikkan transparansi dalam pengambilan keputusan, seperti pengelolaan retribusi pasar atau penataan pedagang kaki lima (PKL), Membangun Kepercayaan dengan Selalu menepati janji dan menunjukkan komitmen terhadap program-program yang dijanjikan kepada pedagang dan masyarakat, Menginspirasi Melalui Komunikasi Positif, Mengadakan dialog langsung dengan pedagang secara berkala untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan Solusi, Memberikan penghargaan atau apresiasi kepada pedagang yang berprestasi, seperti pedagang terbersih, inovatif, atau ramah pelanggan.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
Lurah harus mampu menginspirasi pedagang untuk melihat pasar sebagai pusat ekonomi kreatif dan inovasi, bukan sekadar tempat jual-beli tradisional, Mendorong Inovasi dan Kreativitas Pedagang, Menginspirasi pedagang dengan mengorganisir pelatihan tentang pemasaran online, manajemen usaha, dan strategi menarik pelanggan, Mendorong penggunaan teknologi dalam pemasaran, seperti menjual produk melalui aplikasi lokal atau media sosial.

Selanjutnya Lurah diharapkan mampu Menciptakan Lingkungan Pasar yang Inspiratif, membentuk Pasar sebagai Ruang Ekspresi Lokal seperti Mengembangkan Pasar Permiri sebagai tempat yang mencerminkan kekayaan budaya lokal dengan desain yang unik, seperti mural khas Lubuklinggau atau area seni tradisional, Menginspirasi pedagang untuk mendukung lingkungan melalui penggunaan bahan ramah lingkungan, seperti kantong belanja kain atau pengurangan plastic, Mendorong pedagang untuk bekerja sama melalui koperasi pasar atau forum komunikasi pedagang, dan Mengajak pedagang dan masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan pasar.

Lurah inspiratif juga harus mampu Menggerakkan Program yang Memberdayakan Masyarakat, Menciptakan Kesempatan bagi UMKM Lokal dengan Menginspirasi pedagang untuk memberikan ruang bagi produk-produk UMKM atau petani lokal untuk dipasarkan di Pasar Permiri, Menginisiasi program beasiswa atau fasilitas belajar bagi anak-anak pedagang agar mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak, Menyelesaikan masalah antar pedagang atau dengan pengunjung melalui dialog yang adil dan bijaksana,

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
sehingga menjadi contoh cara menyelesaikan konflik dengan damai, dan Menginspirasi pedagang untuk tetap optimis dan kreatif menghadapi tantangan seperti persaingan dan penurunan daya beli.

Tidak hanya berhenti di situ, Lurah juga mampu Membawa Identitas Lokal ke Kancan Nasional, membentuk Pasar Sebagai Ikon Kota Lubuklinggau, Memimpin transformasi Pasar Permiri menjadi pasar yang dikenal secara nasional karena inovasi, budaya, atau kebersihannya, Menginspirasi pedagang untuk menjual produk-produk khas Lubuklinggau yang memiliki potensi pasar lebih luas, seperti makanan khas atau kerajinan tangan, Menciptakan area yang nyaman untuk pengunjung keluarga, seperti taman kecil, area bermain anak, atau zona kuliner, Mendorong pedagang untuk berinovasi dalam menawarkan pengalaman belanja yang unik, sehingga pasar juga menjadi destinasi wisata.

Terakhir Lurah harus mampu Memahami kesulitan pedagang kecil dan memberikan solusi, seperti pengurangan retribusi bagi yang kurang mampu atau program bantuan modal, Menginspirasi pedagang dengan memberikan dukungan nyata di masa sulit, seperti pandemi atau penurunan ekonomi, melalui subsidi atau program pemulihan ekonomi. Kepemimpinan yang inspiratif di Pasar Permiri akan menciptakan pasar yang tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan, inovasi, dan kebanggaan masyarakat Kota Lubuklinggau.

B. Peran kepemimpinan Lurah di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Prinsip-prinsip *good governance* dalam ruang lingkup kantor lurah sangat penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan inklusif. Berikut adalah implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kerja kantor lurah di Lurah Permiri:




1. **Transparansi.** Semua informasi terkait program, kebijakan, dan layanan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Implementasi di Kantor Lurah Pasar Permiri: Menyediakan papan informasi publik yang memuat program kerja, anggaran kelurahan, dan jadwal pelayanan, Menggunakan media sosial atau aplikasi digital untuk menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat, dan Mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen penting, seperti perizinan atau surat administrasi.
2. **Akuntabilitas.** Lurah bertanggung jawab atas semua keputusan, kebijakan, dan penggunaan anggaran di wilayah kerjanya. Implementasi di Kantor Lurah Pasar Permiri: Menyusun laporan pertanggungjawaban rutin terkait realisasi anggaran dan program kerja, baik kepada masyarakat maupun pemerintah di atasnya, Melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai aturan, dan Membuka ruang evaluasi masyarakat terhadap kinerja kantor lurah melalui musyawarah atau survei kepuasan pelayanan.
3. **Partisipasi.** Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Implementasi di Kantor Lurah Pasar Permiri: Mengadakan musyawarah warga secara rutin untuk mendengarkan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan kelurahan, Membentuk forum warga atau kelompok kerja, seperti karang taruna atau kelompok ibu-ibu

Protected by PDF Anti-Copy Free
PKK, untuk mendukung pelaksanaan program, dan Memberikan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan program kelurahan.

4. Efisiensi dan Efektivitas. Optimalisasi sumber daya yang ada untuk mencapai hasil terbaik. Implementasi di Kantor Lurah Pasar Permiri: Memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi administrasi digital, untuk mempercepat layanan publik, seperti pembuatan KTP, KK, atau surat keterangan, Mengelola anggaran kelurahan secara efisien dengan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, dan Memastikan setiap program kerja memiliki indikator keberhasilan yang jelas.
5. Keadilan dan Inklusivitas. Memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi kepada semua kelompok masyarakat. Implementasi di Kantor Lurah Pasar Permiri: Memastikan semua warga, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau masyarakat miskin, mendapatkan pelayanan yang setara, Menyediakan fasilitas yang inklusif, seperti akses ramah disabilitas di kantor lurah, dan Menyusun kebijakan yang melibatkan semua elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.
6. Supremasi Hukum. Menegakkan aturan dan hukum dengan konsisten di tingkat kelurahan. Implementasi di Kantor Lurah Pasar Permiri: Menegakkan peraturan daerah atau peraturan desa dengan tegas, seperti penertiban administrasi penduduk atau tata kelola lingkungan, Bekerja sama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban di wilayah

kelurahan, dan memastikan setiap tindakan atau keputusan administrasi
Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Responsivitas. Cepat  terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat.. Implementasi di Kantor Lurah Pasar Permiri: Membuka layanan pengaduan melalui hotline, aplikasi pesan, atau kotak saran untuk menerima masukan dari warga, Menyediakan petugas layanan yang sigap dan ramah dalam memberikan bantuan administrasi atau informasi, dan Menyelesaikan pengaduan masyarakat dengan cepat dan tepat waktu.
8. Orientasi Konsensus. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai keputusan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Implementasi di Kantor Lurah Pasar Permiri: Mengadakan musyawarah kelurahan (muskel) untuk membahas program pembangunan, alokasi dana, atau penyelesaian konflik, Menciptakan suasana diskusi yang demokratis, di mana semua warga memiliki kesempatan untuk berpendapat, dan Menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam menyelesaikan perselisihan antarwarga.
9. Daya Tanggap terhadap Keberlanjutan. Memastikan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Implementasi di Kantor Lurah Pasar Permiri: Menggalakkan program pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon atau pengelolaan sampah berbasis komunitas, Memberdayakan masyarakat melalui pelatihan keterampilan yang mendukung ekonomi lokal, dan Mengembangkan program-program kelurahan yang berfokus pada pembangunan jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

10. Desentralisasi. Memberikan wewenang kepada perangkat kelurahan untuk menjalankan tugas operasional dengan tetap diawasi. Implementasi di

Kantor Lurah: Melimpahkan tugas-tugas tertentu kepada perangkat kelurahan, seperti koordinasi atau kepala lingkungan, untuk meningkatkan efisiensi, Membentuk tim kerja di setiap bidang (misalnya, sosial, ekonomi, dan keamanan) untuk memastikan setiap program berjalan optimal, dan Melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja perangkat kelurahan.

Peran kepemimpinan seorang Lurah di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* sangat penting untuk memastikan tata kelola pasar yang transparan, akuntabel, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Lurah Pasar Permiri berperan untuk Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh pedagang dan masyarakat, Membuka laporan keuangan retribusi pasar, seperti alokasi dana untuk kebersihan, perbaikan fasilitas, atau keamanan, Membuat papan pengumuman atau aplikasi digital untuk menyampaikan informasi terkait aturan pasar, jadwal kegiatan, atau perubahan kebijakan.

Lurah Pasar Permiri Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan pasar, Menyusun program kerja yang terukur dan melaporkan hasilnya secara rutin kepada pedagang dan masyarakat, Melibatkan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan pengelolaan

pasar sesuai prosedur., Memberikan laporan rutin kepada pemerintah kota
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
terkait perkembangan pasar.

Lurah Pasar Permiri Melakukan pertemuan dengan pedagang dan masyarakat dalam proses pengambilan Keputusan, Melakukan forum musyawarah dengan pedagang untuk mendengar aspirasi mereka terkait tata kelola pasar, Melibatkan komunitas lokal dalam program-program pengembangan pasar, seperti kebersihan, promosi, atau keamanan, dan Membuka ruang dialog rutin untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan pedagang.

Lurah Pasar Permiri Mengelola sumber daya pasar dengan optimal untuk mencapai hasil terbaik, Menata ulang zonasi pasar agar lebih rapi dan memaksimalkan penggunaan ruang, Menggunakan teknologi untuk mengelola transaksi retribusi secara efisien dan mengurangi potensi kebocoran anggaran, dan Memastikan program kerja memiliki dampak nyata, seperti peningkatan jumlah pengunjung atau pendapatan pedagang.

Lurah Pasar Permiri Memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pedagang tanpa diskriminasi, Menyusun kebijakan yang berpihak pada pedagang kecil, seperti pengurangan retribusi untuk pedagang kurang mampu, Memberikan kesempatan kepada semua pedagang, termasuk perempuan dan kaum marginal, untuk mendapatkan akses yang sama terhadap fasilitas pasar, dan Menyediakan fasilitas yang ramah untuk semua, seperti toilet bersih, akses untuk difabel, dan area keluarga.

Lurah Pasar Permiri Memastikan aturan yang berlaku di pasar ditegakkan secara konsisten dan adil, Menegakkan aturan pasar, seperti larangan berjualan di tempat yang tidak sesuai atau pengelolaan sampah, tanpa pandang bulu,

Berkolaborasi dengan Satpol PP dan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di pasar, dan Menghindari pungutan liar atau praktik korupsi dalam pengelolaan

Lurah Pasar Permiri harus menganggap terhadap kebutuhan, aspirasi, dan masalah pedagang serta pengunjung pasar, Membuat saluran pengaduan, seperti hotline atau aplikasi, untuk menampung keluhan dan menyelesaikannya dengan cepat, Mengadakan kunjungan langsung ke pasar untuk berdialog dengan pedagang dan memahami situasi di lapangan, dan Menyediakan layanan pusat informasi di pasar untuk membantu pedagang atau pengunjung yang membutuhkan bantuan.

Lurah Pasar Permiri Membangun kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan yang berpengaruh besar terhadap pasar, Melibatkan pedagang, tokoh masyarakat, dan pihak terkait dalam musyawarah sebelum mengambil kebijakan besar seperti perubahan tarif retribusi atau renovasi pasar, dan Mendorong penyelesaian konflik secara dialogis dan kekeluargaan.

Lurah Pasar Permiri Mengelola pasar dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, Menggalakkan program pasar hijau dengan mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan dan pengelolaan sampah yang baik, Memastikan pasar mampu menjadi pusat ekonomi yang terus berkembang dan mendukung kesejahteraan pedagang dalam jangka panjang, dan Mengedukasi pedagang tentang pentingnya praktik bisnis berkelanjutan, seperti efisiensi energi dan pengurangan limbah

Lurah Pasar Permiri Memberikan otonomi kepada pengelola pasar untuk menjalankan tugas operasional sehari-hari dengan tetap diawasi, Menunjuk

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
tim pengelola pasar yang kompeten dan memberikan wewenang untuk
mengurus kebersihan, keamanan, dan administrasi pasar, dan Mengawasi
kinerja pengelola pasar melalui audit rutin dan evaluasi yang objektif.


Dengan menerapkan prinsip *good governance*, Lurah Pasar Pemiri
dapat menciptakan pasar yang transparan, responsif, adil, dan berkelanjutan.
Tata kelola pasar yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan
pedagang, kenyamanan pengunjung, serta menjadikan Pasar Pemiri sebagai
pusat ekonomi yang berintegritas.

C. Hambatan dan solusi Lurah Pasar Permiri dalam menghadapi indikasi terjadinya kegiatan pungutan liar.

Hambatan yang dihadapi oleh Lurah Pasar Permiri dalam menghadapi indikasi terjadinya kegiatan pungutan liar (pungli) dapat meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Kurangnya Pengawasan dan Sumber Daya. Tidak adanya pengawasan yang memadai atau kurangnya petugas yang bertugas secara khusus untuk memantau aktivitas di pasar, sehingga sulit mendeteksi dan mencegah praktik pungli. Minimnya alokasi sumber daya, baik dalam bentuk tenaga kerja, teknologi, atau anggaran untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif.
2. Budaya dan Kebiasaan. Pungli sering kali dianggap sebagai "hal biasa" di pasar tradisional, sehingga ada resistensi dari pedagang atau masyarakat untuk melaporkan atau menghindari pungli. Ketergantungan pada oknum

Protected by PDF Anti-Copy Free
tertentu yang melakukan pungli untuk mendapatkan akses atau
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
"perlindungan" tertentu.

3. Kurangnya Keberanian . Pedagang atau masyarakat sering kali takut untuk melaporkan karena khawatir akan adanya intimidasi atau balasan dari pelaku. Kurangnya mekanisme pengaduan yang aman dan terpercaya bagi korban atau saksi pungli.
4. Keterlibatan Oknum di Internal Pasar. Adanya oknum di dalam struktur organisasi pasar yang terlibat langsung atau menutupi praktik pungli. Hal ini membuat pemberantasan pungli menjadi lebih sulit karena ada konflik kepentingan.
5. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi. Minimnya sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat tentang bahaya pungli dan mekanisme pelaporan yang ada. Kurangnya pemahaman tentang dampak negatif pungli terhadap ekonomi pasar dan kesejahteraan pedagang.
6. Penegakan Hukum yang Lemah. Ketidakpastian dalam penegakan hukum terhadap pelaku pungli, baik karena proses yang panjang maupun kurangnya tindak lanjut terhadap laporan. Hukuman yang tidak cukup memberikan efek jera kepada pelaku pungli.
7. Dinamika dan Kompleksitas Pasar. Pasar adalah tempat yang ramai dengan aktivitas ekonomi informal, sehingga sulit untuk memonitor semua interaksi yang terjadi. Besarnya jumlah pedagang dan pengunjung pasar membuat pengawasan harus dilakukan secara komprehensif, tetapi sering kali tidak tercapai.

Protected by PDF Anti-Copy Free
Solusi Potensial untuk mengatasi hambatan ini, Lurah di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau dapat:

1. Memperkuat pengawasan dan membentuk tim khusus atau bekerja sama dengan pihak berwenang seperti Satpol PP atau POLRI;
2. Meningkatkan sosialisasi tentang bahaya pungli melalui papan informasi, media sosial, atau forum pasar;
3. Menciptakan mekanisme pengaduan yang aman dan anonim untuk mendorong pelaporan pungli;
4. Melibatkan komunitas pedagang untuk turut memantau dan melaporkan indikasi pungli; dan
5. Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan adanya tindak lanjut terhadap laporan pungli dan memberikan efek jera kepada pelaku.

D. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau agar mengurangi kegiatan pungutan liar.

Strategi optimalisasi fungsi pengawasan di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau untuk mengurangi kegiatan pungutan liar (pungli) dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak.

Berikut beberapa bentuk-bentuk strategi yang dapat diterapkan oleh Lurah Pasar Permiri:

- Protected by PDF Anti-Copy Free**
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
1. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan 1: Membentuk Tim Pengawas Khusus. Bentuk tim khusus yang terdiri dari aparat pasar, perwakilan pedagang, dan aparat kepolisian (seperti Satpol PP atau kepolisian) untuk memantau aktivitas pasar rutin. Tugas Tim Fokus pada deteksi dini, pelaporan, dan penindakan terhadap pungli. dan berikan pelatihan tentang cara mengidentifikasi pungli dan prosedur penindakan sesuai aturan hukum.
 2. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan 2: Peningkatan Penggunaan Teknologi.
 - a. Penerapan CCTV, Pasang CCTV di titik-titik strategis pasar, terutama di tempat yang rawan pungli. Pastikan pengawasan dilakukan secara *real-time*.
 - b. Melakukan sistem Pembayaran Digital: Mengadopsi sistem pembayaran digital untuk retribusi pasar guna mengurangi kontak langsung antara pedagang dan petugas yang rentan terhadap pungli.
 - c. Buat aplikasi atau platform online yang memungkinkan masyarakat dan pedagang melaporkan pungli secara anonim.
 3. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan 3: Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi, seperti Sosialisasi Anti-Pungli, Lakukan kampanye anti-pungli secara masif melalui papan informasi, selebaran, media sosial, dan acara pasar. melakukan Edukasi kepada Pedagang, Berikan edukasi kepada pedagang tentang hak dan kewajiban mereka, serta cara melaporkan pungli jika terjadi, Kolaborasi dengan Media Lokal, Libatkan media lokal untuk memberikan pemberitaan yang mendukung program anti-pungli.

- Protected by PDF Anti-Copy Free**
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
4. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan 4: Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum. Peraturan Pasar, Perbarui peraturan yang mengatur aktivitas di pasar, termasuk ancaman pungli dan sanksi tegas terhadap pelaku, Penegakan Hukum yang Konsisten, Pastikan ada tindakan hukum yang nyata terhadap pelaku pungli agar memberikan efek jera, Monitoring Berkala, Lakukan audit atau evaluasi berkala untuk memastikan program anti-pungli berjalan dengan baik.
 5. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan 5: Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat. Kelompok Pedagang Anti-Pungli, Bentuk kelompok pedagang yang proaktif dalam melaporkan pungli dan memberikan dukungan moral kepada pedagang lain, Mekanisme Pengaduan Anonim, Sediakan hotline, kotak saran, atau nomor WhatsApp yang memungkinkan pengaduan secara anonym, Apresiasi dan Penghargaan, Berikan penghargaan kepada masyarakat atau pedagang yang aktif berkontribusi dalam pemberantasan pungli.
 6. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan 6: Pengawasan Terpadu dan Terkoordinasi. Kolaborasi Antarlembaga, Tingkatkan koordinasi antara pihak pasar, Satpol PP, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk pengawasan terpadu, Jadwal Inspeksi Rutin, Lakukan inspeksi mendadak di pasar untuk memastikan tidak ada pungli yang berlangsung secara terang-terangan, Pelaporan Transparan, Publikasikan hasil pengawasan secara berkala untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
 7. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan 7: Penyediaan Sistem Retribusi yang Transparan, Digitalisasi Retribusi, Terapkan sistem pembayaran

Protected by PDF Anti-Copy Free
retribusi berbasis aplikasi atau QR Code untuk menghindari interaksi
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
langsung antara petugas dan pedagang, Papan Informasi Retribusi, Pasang
papan informasi tentang retribusi resmi di tempat-tempat yang mudah
terlihat oleh pedagang dan pengunjung pasar.

8. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan 8: Membangun Kepercayaan Publik, Pendekatan Persuasif, Libatkan pedagang dalam diskusi terbuka tentang pentingnya pemberantasan pungli untuk menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan adil, Pemberitaan Positif, Sebarkan cerita sukses pengurangan pungli di pasar lain untuk memotivasi semua pihak.

BAB VI

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

- Protected by PDF Anti-Copy Free**
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
1. Peran kepemimpinan seorang Lurah yang berakhlak sangat penting dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersahaja terutama yang ditunjukkan oleh Lurah Pasar Permiri Kota Lubuklinggau. Dalam hal ini Lurah yang berakhlak menjadi panutan bagi masyarakat melalui sikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Peran kepemimpinan seorang Lurah yang kreatif di Pasar Permiri, Kota Lubuklinggau, sangat penting untuk mendukung kemajuan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan pedagang, dan menciptakan pasar yang nyaman bagi masyarakat. Peran kepemimpinan Lurah di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau yang juga harus solutif, yaitu mampu menawarkan solusi yang konkret, cepat, dan efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pedagang dan masyarakat. dan Peran kepemimpinan seorang Lurah yang inspiratif di Pasar Permiri, Kota Lubuklinggau, sangat penting untuk membangkitkan semangat pedagang, menciptakan inovasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setempat.
 2. Hambatan yang dihadapi oleh Lurah Pasar Permiri dalam menghadapi indikasi terjadinya kegiatan pungutan liar (pungli) dapat meliputi beberapa aspek, antara lain: Kurangnya Pengawasan dan Sumber Daya, Budaya dan Kebiasaan. Pungli sering kali dianggap sebagai "hal biasa" di pasar tradisional, Kurangnya Keberanian Melaporkan. Pedagang, Keterlibatan Oknum di Internal Pasar, Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi, Penegakan Hukum yang Lemah, Dinamika dan Kompleksitas Pasar
 3. Solusi Potensial untuk mengatasi hambatan ini, Lurah di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau dapat: Memperkuat pengawasan dengan membentuk

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

tim khusus atau bekerja sama dengan pihak-pihak penwenang seperti Satpol PP atau POLRI, Meningkatkan sosialisasi tentang bahaya pungli melalui papan informasi, media atau forum pasar, Menciptakan mekanisme pengaduan yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk mendorong pelaporan pungli, Melibatkan komunitas pedagang untuk turut memantau dan melaporkan indikasi pungli, dan Bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan adanya tindak lanjut terhadap laporan pungli dan memberikan efek jera kepada pelaku.

4. Strategi optimalisasi fungsi pengawasan di Pasar Permiri Kota Lubuklinggau untuk mengurangi kegiatan pungutan liar (pungli) dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak. Beberapa bentuk-bentuk strategi yang dapat diterapkan oleh Lurah Pasar Permiri: Membentuk Tim Pengawas Khusus, Peningkatan Penggunaan Teknologi, Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi, Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum, Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat, Pengawasan Terpadu dan Terkoordinasi, Penyediaan Sistem Retribusi yang Transparan, dan Membangun Kepercayaan Publik.

B. Rekomendasi

Lurah pasar permiri Kota Lubuklinggau sebaiknya melakukan beberapa Langkah rekomendasi sebagai berikut:

1. Membentuk tim Anti Pungli Tingkat Kelurahan;

- Protected by PDF Anti-Copy Free**
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
2. Mengoptimalkan peran teknologi (CC TV, e-yetibusi);
 3. Rutin melakukan inspeksi mendadak;
 4. Kerjasama dengan mitra: POLRI, Pol PP, Jaksa;
 5. Rutin kampanye Anti
 6. Rutin mengedukasi pedagang pasar (Via Tatap Muka; Via Grup WA);
 7. Hotline aduan Tingkat Kelurahan; dan
 8. Membentuk pedagang Anti Pungli

DAFTAR PUSTAKA

- Ariasa, I. P. P., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Efektivitas Pemberantasan Pungutan Liar dalam Pelayanan Publik di Desa Pangsan Kecamatan Petang Kabupaten Badung. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 94-97.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

- Protected by PDF Anti-Copy Free**
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
- Arliman, L. (2020). Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 49-72.
- Bass, B. M. (2006). *Transformational Leadership*. Lawrence Elabaum Associating.
- Bennis, W. G. (1959). *Leadership theory and administrative behavior: The problem of authority* (Vocent Media).
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Fiedler, F. E. (1981). Leadership effectiveness. *American Behavioral Scientist*, 24(5), 619-632.
- GALANG DHARMA JOLIAN, J. O. L. (2020). *PERAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN MASALAH PUNGUTAN LIAR PARKIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Gunawan, R. M. B. (2021). *GRC (Good Governance, Risk Management, And Compliance)-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Hadiyanti, H. (2015). Peran kepemimpinan camat dalam meningkatkan kinerja aparatur birokrasi di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 3(1), 206-219.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1997). Situational leadership. In *Dean's Forum* (Vol. 12, No. 2, p. 5).
- Hot, I. (2017). *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Deepublish.
- Hutahaean, W. S., & SE, M. T. (2021). *Filsafat dan Teori Kepemimpinan*. Ahlimedia Book.
- Istiharoh, R. (2017). Peran Kepemimpinan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai di Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 1(1), 151-169.
- Izzati, N., & Affa, M. S. (2023). Peran Pimpinan Universitas Dalam Mempromosikan Keadilan Sosial dan Kesetaraan Bagi Mahasiswa. *Universal Grace Journal*, 1(2), 250-260.
- Jaspin, S. W., Edowai, R., Haidar, A. M., Dermawan, A. W., Said, M., Remmang, H., ... & Menne, F. (2021). *KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIAL & BUDAYA ORGANISASI DALAM PELAYANAN PUBLIK*. Berkah Utami.
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good Governance di Instansi Pemerintahan Daerah. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 326-353.

- Marpaung, L. (1992). *Tindak pidana korupsi: masalah dan pemecahannya. Membahas kasus-kasus korupsi: manipulasi dana proyek, manipulasi tanah negard, pungutan liar, tindak pidana korupsi secara umum. buku kedua.* Sinar Grafika.
- Mu'ah dkk (2019). *Kepemimpinan* Rajawali Press. PT Raja Grafindo Persada.
- Nilasari Medina (2023). *Kepemimpinan dan Inovasi.* PT Rajawali Grafindo Persada.
- Ozguner, Z., & Ozguner, M. (2014). A managerial point of view on the relationship between of Maslow's hierarchy of needs and Herzberg's dual factor theory. *International Journal of Business and Social Science*, 5(7).
- Pratiwi, N. T. S. I., & Nengah, A. N. (2019). Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Bentuk Kebijakan Kriminal Di Indonesia. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(10), 1-15.
- Rimbano, D., Famalika, A., Nadziro, N., & Diana, H. S. (2022). *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar.* Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2015. *Perilaku Organisasi.* Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohman, A., & Trihardianto, W. T. (2019). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance* (pp. 1-147). Intrans Publishing.
- Rukmawana, A. N., Hasan, H., & Hamsir, H. (2021). PUNGUTAN LIAR DALAM PESPEKTIF HUKUM ISLAM. *SIYASATUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'ITYYAH*, 2(3), 625-634.
- Sadat, A. (2017). Peranan Camat dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *PUBLIK REFORM: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(2).
- Sadat, A. (2017). Peranan Camat dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *PUBLIK REFORM: JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 2(2).
- Saliman, A. R. (2022, April). Pencegahan Korupsi dengan Mengutamakan Peran Kepemimpinan Lokal yang Berakhlak, Kreatif, Solutif dan Inspiratif di Bangka Belitung. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 191-203).
- Saliman, A. R. (2022, April). Pencegahan Korupsi dengan Mengutamakan Peran Kepemimpinan Lokal yang Berakhlak, Kreatif, Solutif dan Inspiratif di Bangka Belitung. In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum* (pp. 191-203).
- Sari, Y. R. (2017). Kepemimpinan FX. Hadi Rudyatmo dalam Mewujudkan Solo Kota Layak Anak. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 8(1), 122-129.

- Protected by PDF Anti-Copy Free**
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
- Sari, Y. R., & Fauzan, N. M. (2023). PERAN AI INTELIGENIAL DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL.
- Sonatra, P. N., Novianto, W. T., & Riewanto, A. (2019). Konstruksi Pengawasan Independen Untuk Menegakkan Tindak Pidana Pungutan Liar Dalam Pelayanan Publik. *Masalah Hukum*, 48(1), 60-70.
- Sugito, S., Haryati, E., Haryati, E., Prayudi, A., & Anindya, D. A. (2024). *Organizational Behavior*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Sutikno, M. S. (2018). *Pemimpin dan kepemimpinan: Tips praktis untuk menjadi pemimpin yang diidolakan*.